

e-news letter

AGUSTUS II 2020

**PKSPARLEMEN**

KREATIF, INOVATIF, KONSTRUKTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Dr. KH Surahman Hidayat, M.A.

# RUU Cipta Kerja Dorong Terjadinya **Abuse of Power**



# Mengambil semua kewenangan, tapi berkerja tanpa daya

Ada gejala eksekutif minta ingin ambil semua urusan, menggesa urusan undang-undang hingga mengambil peran langsung. Anehnya jalan pemerintahan masih seperti ini saja, tanpa covid pun rakyat terhempas di pelataran negeri.

Entah sampai kapan kita akan mengalami situasi tidak menentu ini. Situasi yang slow down secara eksternal dan global terjadi karena Pandemi, namun ditegaskan oleh sikap otoritas yang terengah-engah bagai kehabisan napas. Terlebih cara dan sikap Pengambil keputusan seperti kehilangan arah dan tujuan.

Alih-alih melompat, yang ada malah melambat. Pidato boleh gagah dan membuyi, namun fakta lapangan tak bisa dibuang abai. Rumitnya secara simultan membangun dan mencari pembenaran bahwa pelambatan terjadi secara global, sembari tegaskan bahwa kita lebih baik dan lebih

beruntung.

Pemerintah lupa bahwa pondasi ekonomi setiap negara berbeda satu sama lain. Tidak memulai dari garis start yang sama. Ada banyak negara bisa lewat finish, namun negara lain belum tentu. Betul bahwa resesi bagi negara maju masalah, namun bagi negara berkembang jadi masalah besar. Karena bukan sebatas definisi tentang minus dalam tiga kuartal secara beruntun, namun tentang kondisi faktual yang terseok-seok dan masyarakat bawah. Tanya saja pada angka asli; pengangguran yang tinggi, ekonomi yang terkontraksi, dan resesi ekonomi mengintai. Data yang

tak pernah tepat.

RUU OL jalan terus, resesi mengintai dan paparan Covid enggan melandai. Janji 5,5 persen. Di masa normal janji 7 %, yang ada saja hanya dapat 5 persen digapai dengan membabi buta. Dari mulai tax amesty, hingga cabut subsidi. Hasilnya belum meroket tajam. Jika ada kegagalan, tinggal buang badan bahwa semua sama. Rumus sama untuk semua urusan: berjanji, tak harus ditepati.

Ada gejala eksekutif minta ingin ambil semua urusan, menggesa urusan undang-undang hingga mengambil peran langsung. Anehnya jalan pemerintahan masih seperti ini saja, tanpa covid pun rakyat terhempas di pelataran negeri. Pemerintah tidak jadi subjek pun tidak jadi objek. Kebingungan mengambil keputusan dan sinkronisasi yang tak unjung usai.

Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan membawa bangsa ini kilas balik



ke masa lalu, dimana kekuasaan tersentral pada Pemerintah Pusat. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2

yang menegaskan bangsa ini tidak menganut sentralisasi. Bersemangatlah. Pekan depan kita rayakan kemerdekaan dengan leluasa mencintai Indonesia.

# RUU Cipta Kerja Mendorong Terjadinya *Abuse of Power*

Presiden punya instrumen dalam menjalankannya pemerintahan dalam era demokrasi dan sistem otonomi daerah. Tidak diperlukan memusatkan perizinan berusaha pada Pemerintah Pusat karena ini akan berpotensi terjadinya *abuse of power*

**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (06/08) — Pembahasan RUU omnibus Law Cipta Kerja saat ini telah memasuki Bab III atau inti dari undang-undang tersebut, Surahman Hidayat menilai isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan memperburuk proses pengelolaan perizinan berusaha.

"Dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja banyak menghilangkan kewenangan kementerian dan pemerintah daerah dalam mengelola perizinan berusaha, untuk kemudian dikelola Pemerintah Pusat dengan ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut akan memperburuk proses pengelolaan perizinan berusaha," ujar Surahman.

Anggota Komisi II DPR RI

dari Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ingin memusatkan pengelolaan izin berusaha pada satu pintu tanpa melalui kementerian dan Pemerintah Daerah.

"Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ingin menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam pengurusan IMB. Kemudian, perizinan memproduksi, impor, maupun ekspor persenjataan tidak lagi melalui kementerian pertahanan namun diganti dengan frasa Pemerintah Pusat. Selain menghilangkan peran Pemerintah Daerah, banyak perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan kementerian digantikan dengan frasa Pemerintah

Pusat," kata Surahman.

Menurut anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PKS ini, kebijakan tersebut dapat membawa konsekuensi negatif, pertama, memusatkan perizinan pada satu kementerian atau lembaga akan memperlambat perizinan itu sendiri karena akan terjadi overload perizinan.

"Kedua, pemeriksaan akan tidak bisa dilakukan secara detail dan rinci, sehingga akan menyebabkan terjadinya malpraktik perizinan dikarenakan menumpuknya perizinan yang harus diselesaikan secara cepat, maka besar kemungkinan adanya badan usaha yang tidak layak atau memenuhi syarat akan diberikan izin, karena syarat yang diajukan akan lebih fokus pada persyaratan administrasi," paparnya.

Ketiga, lanjutnya, akan menimbulkan ketidakpastian investasi karena peraturan rinci perizinan berusaha diatur melalui peraturan pemerintah. Satu sisi ini akan membuat fleksibel, namun akan membuat khawatir investor, pemerintah berganti maka akan memungkinkan peraturan



berganti pula. Situasi ini tentunya tidak menguntungkan investor yang membutuhkan kepastian investasi dalam jangka waktu panjang.

Keempat, akan membawa bangsa ini kilas balik ke masa lalu dimana terjadi sentralistik kekuasaan Pemerintah Pusat.

"Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan membawa bangsa ini kilas balik ke masa lalu, dimana kekuasaan tersentral pada Pemerintah Pusat. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2 yang menegaskan bangsa ini tidak menganut sentralisasi

kekuasaan Pemerintah Pusat, namun menjalankan desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah," tegas Surahman.

Surahman Hidayat berpendapat bahwa Pemerintah Pusat seperti terlihat kebingungan dalam memperbaiki permasalahan perizinan berusaha di Indonesia, hal ini tergambar dari ketidakjelasan desain perizinan yang ingin dibangun dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Aturan yang dibuat dalam Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja memperlihatkan Pemerintah Pusat seperti seorang atasan yang tidak mempercayai bawahan sehingga semuanya ingin dilakukan sendiri," kata Surahman.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# RUU Cipta Kerja Harus Bangun Ekonomi Tanpa Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup

Saya berharap UU Cipta Kerja mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Wonogiri (05/08) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyampaikan bahwa pada RUU Cipta Kerja masih perlu penguatan aspek perlindungan lingkungan akibat pembangunan ekonomi.

Kini, menurut Hamid, Pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat RI telah memasuki pembahasan Bab III. Salah satu sektor krusial pada bab tersebut adalah sektor Lingkungan Hidup. Kerap kali pembangunan ekonomi yang menjadi ruh RUU Cipta Kerja mengesampingkan kepentingan lingkungan hidup.

"Saya mengingatkan, bahwa paradigma pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan untuk menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja. Pembangunan sumber daya

alam kita selama ini telah salah arah. Pertambangan batu bara, gas, minyak bumi menghasilkan kerusakan lingkungan. Saya berharap UU Cipta Kerja mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial", Urai Hamid.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini menambahkan, bahwa Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menuai pro kontra, sebab instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dilemahkan. Hal ini terjadi akibat tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau tidak menjadi syarat dalam penerbitan izin usaha.

Draft RUU Cipta kerja ini, lanjut Politisi PKS ini, masih dominan berasal dari pemerintah. Pemerintah mesti

memperhatikan betul akan usaha rakyat seperti pertanian, kehutanan, dan kelautan yang bergantung pada lingkungan.

"Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak. Contohnya Ekosistem laut yang bagus akan menghasilkan ikan yang berlimpah. Begitupun hutan yang bagus akan menghasilkan madu yang banyak", Jelas Hamid.

Hamid menekankan, bahwa melalui fraksinya di PKS, telah menyampaikan berbagai hal terkait dengan kerusakan lingkungan akibat regulasi yang tidak kuat. Kerusakan lingkungan hidup hanya akan menimbulkan kerugian dalam jangka pendek dan jangka panjang.

"Pelonggaran standar lingkungan sebagaimana telah tercantum pada UU 32 tahun 2009, hanya menciptakan keuntungan sesaat dan segelintir orang. Saya tidak anti investasi dan kemajuan ekonomi. Kami FPKS sangat mendorong adanya investasi dan penguatan ekonomi. Tapi kemajuan ekonomi mesti di bingkai dengan penguatan instrumen perlindungan lingkungan hidup", tutup Hamid Noor Yasin





# Perubahan Mekanisme Amdal Pada RUU Cipta Kerja Perlu Dikaji Ulang

RUU Cipta Kerja ini kan regulasi besar yang nantinya akan dipakai dalam menjalankan berbagai urusan negara. Jangan sampai regulasi ini menjadi blunder bagi kemaslahatan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang bahkan orang asing

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (05/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritisi usulan Pemerintah pada RUU Cipta Kerja berkaitan dengan mekanisme amdal yang membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk rampung sehingga melalui usulan RUU Cipta Kerja beberapa ketentuan terkait Amdal ini diubah atau bahkan dihapus.

Dikatakannya, usulan ini terlalu mengada-ada karena persoalan Amdal yang banyak dijumpai saat ini adalah pada persoalan teknis dipangkas sehingga yang perlu diperbaiki

hanya pada metode pelaksanaan dan pengawasannya saja.

"RUU Cipta Kerja ini kan regulasi besar yang nantinya akan dipakai dalam menjalankan berbagai urusan negara. Jangan sampai regulasi ini menjadi blunder bagi kemaslahatan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang bahkan orang asing", kritis Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, persoalan mekanisme Amdal ini tidak perlu sampai merubah beberapa ketentuan tentang amdal dalam UU 32 tahun 2009 tentang

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Johan bersama team kecil di fraksinya pada pengawalan pembahasan RUU Cipta Kerja, telah menganalisis tentang draft RUU Ciker banyak menghapus kewenangan Pemda.

"Penghapusan peran Pemda justru akan menyulitkan proses pengawasan tentang perlindungan lingkungan," tegas Johan.

Legislator asal Sumbawa ini secara tegas meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji lebih dalam perubahan definisi Amdal dalam RUU cipta Kerja versi pemerintah yang mengubah ketentuan terkait Amdal adalah bagian dari proses perencanaan menjadi hanya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Johan berargument, bahwa hasil kajiannya bersama Fraksi PKS untuk Amdal mesti dikembalikan definisinya ke UU existing, karena hakikatnya perlindungan lingkungan adalah bagian dari perencanaan yang harus dilakukan oleh



permrakarsa kegiatan dan atau investor sebagai bagian dari komitmen.

Johan menegaskan, sangat tidak tepat bila Amdal hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, karna akan banyak terjadi persoalan-persoalan yang tidak dapat diprediksi.

"Bila pemerintah ngotot dengan terminologi Amdal ini, kami memprediksi kedepannya akan ada dorongan praktik-praktik eksploitatif yang tidak memperhatikan lagi mengenai perlindungan lingkungan", ungkap Johan.

Politisi NTB ini menambahkan, pada persoalan Amdal di RUU Cipta Kerja juga menyoroti

penghapusan ketentuan mengenai komisi penilai amdal yang akan digantikan dengan tim uji dokumen amdal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Sebab Komisi Penilai Amdal (KPA) merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses penyusunan Amdal," terangnya.

Johan membeberkan, Minimal ada dua sudut pandang berkaitan dengan dokumen Amdal yaitu kejelasan (Rill) dan keterwakilan atau Representatif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Ekonomi Minus

# Syaikh: Pemerintah Jangan Ngotot Bahas Omnibus Law, Fokus Covid-19

Saya prihatin dengan situasi ini. Ekonomi kita minus, resesi di ambang pintu. Tapi kok pemerintah terkesan ngotot menyelesaikan Omnibus Law. Harusnya fokus atasi wabah Covid-19

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Karawang (07/08) — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32%. Kondisi ini membuat Indonesia di ambang resesi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhulmuhammad meminta pemerintah untuk fokus tangani Covid-19, bukan justru ngotot bahas Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

"Saya prihatin dengan situasi ini. Ekonomi kita minus, resesi di ambang pintu. Tapi kok pemerintah terkesan ngotot menyelesaikan Omnibus Law. Harusnya fokus atasi wabah

Covid-19," kata Syaikhulmuhammad.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu, pilihan fokus harus diambil pemerintah. Sebab terbukti, opsi melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan alasan memulihkan ekonomi, justru tak tepat.

"Ini terlihat dari angka kasus positif corona yang terus meningkat. Bahkan, muncul kluster-kluster baru di perkantoran dan sebagainya. Ini terjadi karena memang belum saatnya Indonesia memasuki 'New Normal'," pungkaskannya.

"Jauh-jauh hari sudah kami sampaikan dari F-PKS. Kita belum saatnya longgar atau 'New Normal'. Karena wabah belum sampai puncaknya," imbuh Syaikhulmuhammad.

Setidaknya, lanjut mantan Wakil Walikota Bekasi itu, pemerintah fokus pada dua solusi. Pertama, Penanganan Covid-19, karena satu-satunya cara yang dapat memulihkan mobilitas warga adalah dengan memberikan rasa aman agar warga berani beraktivitas.

"Rasa aman inilah yang belum dapat diberikan oleh Pemerintah," ujar Syaikhulmuhammad.

Hal ini terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam melakukan penanganan Covid-19. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan Deep Knowledge Group, konsorsium perusahaan investasi internasional, terkait daftar 100 negara yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Daftar ini dibuat berdasarkan 130 parameter berbagai macam



data mulai dari efisiensi karantina, kemampuan pengawasan serta deteksi, kesiapan sistem kesehatan, hingga efisiensi kerja pemerintah.

Hasiinya, Indonesia menempati peringkat 97, di atas Bahama, Laos, dan Kamboja. Menurut Universitas Oxford, bahkan Indonesia mendapat nilai D, paling rendah di antara semua negara ASEAN, bahkan Kamboja.

Dari penilaian yang dilakukan, terlihat bahwa efisiensi kerja pemerintah ternyata masih buruk," tegas Syaikhulmuhammad.

Padahal, lanjut Syaikhulmuhammad, dengan banyaknya keterbatasan Indonesia di bidang kesehatan, maka dibutuhkan kinerja yang luar biasa dari Pemerintah untuk penanganan

Covid-19 ini. Dengan cara ini, ekonomi juga akan tumbuh.

Menurut Syaikhulmuhammad, kondisi ini tercipta karena pemerintah terkesan tidak fokus dan lebih mementingkan ekonomi. Kemudian, ditambah lagi terkesan lebih memperhatikan RUU Ciptaker. Padahal RUU ini mendapat banyak penolakan dari berbagai komponen masyarakat.

"Ini aneh. Ada apa dengan Omnibus Law? Kok sangat ngotot sekali untuk segera disahkan. Sementara urusan Covid-19 masih belum tertangani dengan optimal," jelas Syaikhulmuhammad.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: Aspirasi Pelaku UMKM Kami Perjuangkan dalam RUU Cipta Kerja

“Kami FPKS tetap konsisten menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. Apalagi pembahasannya di masa reses. Meski demikian, kami tetap memberikan pandangan sikap fraksi baik di dalam parlemen melalui catatan kritis FPKS dalam DIM RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maupun di luar parlemen.

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (06/08) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengkritisi berjalannya pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan di masa reses. Namun di sela kunjungan kerja ke daerah pemilihannya, ia terus memantau perjalanan RUU ini dan akan memperjuangkan aspirasi pelaku UMKM pada RUU Cipta kerja ini.

Legislator asal Sumatera Barat II ini meruntut perjalanan RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan oleh Presiden

Jokowi saat Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 DPR baru menerima draft RUU Cipta Kerja dan Surat Presiden. Setelah RUU Cipta Kerja disepakati di dalam Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun 2019-2020 pada tanggal 30 Maret 2020, RUU ini dibahas maraton di Badan Legislatif DPR RI.

“Kami secara institusi di Fraksi PKS sejalan dengan keinginan banyak masyarakat untuk menolak RUU Cipta Kerja

ini. Tapi Penolakan RUU Cipta Kerja di fraksi minim dukungan di DPR sehingga hingga kini RUU Cipta Kerja terus di bahas”, ujar Nevi.

Nevi menambahkan, pembahasan RUU Cipta Kerja ini banyak sekali menerabas pakem kebiasaan di DPR RI. Salah satunya pembahasan di masa reses. Reses yang seharusnya digunakan anggota DPR untuk bekerja di luar kantor dengan mengunjungi daerah pemilihannya, tapi ada pembaharuan RUU yang seharusnya jadwal pembahasan di masa sidang.

“Kami FPKS tetap konsisten menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. Apalagi pembahasannya di masa reses. Meski demikian, kami tetap memberikan pandangan sikap fraksi baik di dalam parlemen melalui catatan kritis FPKS dalam DIM RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maupun di luar parlemen. Meski suara kami kecil di parlemen, kami akan meminta bantuan masyarakat untuk menyuarakan sikap



kami”, Kata Nevi.

Salah satu sikap institusinya, lanjut politisi PKS ini, adalah berkaitan dengan UMKM. Pada RUU Cipta Kerja terdapat perubahan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu perubahan yang krusial adalah diubahnya kriteria UMKM dalam Pasal 94 UU tentang UMKM, sehingga tidak ada lagi nilai limitasi batas minimum kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan pada setiap skala usaha.

Perubahan pada pasal yang mengatur UMKM ini, lanjut Nevi, dapat mempengaruhi proses pengembangan UMKM. UMKM kesulitan berkembang oleh sebab pada proses

menumbuhkan UMKM, diperlukan kriteria setiap skala usaha agar semua fasilitas kemudahan atau insentif yang diberikan bagi UMKM benar-benar tepat sasaran.

“Fraksi PKS akan selalu terdapan dalam memperjuangkan pengembangan UMKM. Kita mengetahui bersama UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB yaitu sebesar 60,34% di tahun 2019. Selain itu dengan memperkuat UMKM maka kita akan memperkuat ekonomi kerakyatan, karena UMKM merupakan penyangga ekonomi kerakyatan” urai Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Sakinah Aljufri: RUU Cipta Kerja Komersialkan Pendidikan Indonesia

“Pendidikan adalah layanan mendasar dalam kehidupan, yang harus didapat oleh seluruh masyarakat kita. Apabila pendidikan dijadikan praktik komersil maka pendidikan kita akan dikuasai oleh para pemilik modal besar

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (10/08) — RUU Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dalam draft RUU Cipta Kerja, yang terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal dengan total 1.028 halaman itu juga mencakup sektor pendidikan.

Pada sektor pendidikan, RUU Cipta Kerja memberi peluang besar untuk membuka praktik kegiatan komersil di dunia pendidikan.

Hal inilah yang menjadi sorotan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, dalam keterangannya disela-sela kesibukan

melakukan kegiatan reses di Palu, Senin, (10/08).

“Secara umum tujuan RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan adalah komersialisasi pendidikan kita,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Sakinah pun mengkritik perubahan pasal yang menjadi landasan badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba menjadi komersil.

“Pada pasal 53 ayat 3 draft RUU Cipta Kerja, mengubah badan hukum pendidikan yang sebelumnya adalah berprinsip nirlaba menjadi dapat berprinsip nirlaba. Ini

artinya dasar utama badan hukum pendidikan adalah bukan nirlaba,” ungkapnya.

Bunyi pasal 53 ayat 3 dalam RUU Cipta Kerja adalah; Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Menurut Sakinah, pendidikan merupakan layanan dasar yang setiap warga negara berhak mengenyamnya sesuai dengan bunyi dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: 'Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan',

“Pendidikan adalah layanan mendasar dalam kehidupan, yang harus didapat oleh seluruh masyarakat kita. Apabila pendidikan dijadikan praktik komersil maka pendidikan kita akan dikuasai oleh para pemilik modal besar,” ucap politisi asal Sulawesi Tengah.

Komersialisasi pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang dapat



diperjual belikan yang bertujuan meraup keuntungan yang besar bagi pemiliknya.

“Hal itu tercermin dari penggantian frasa 'berprinsip nirlaba' menjadi 'dapat berprinsip nirlaba'. Prinsip nirlaba dalam pendidikan adalah tidak mencari untung dalam kegiatan pendidikan, melainkan

bertujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Namun jika prinsipnya diubah menjadi dapat berprinsip nirlaba maka ini artinya prinsip utama dalam pendidikan adalah mencari untung, namun dapat juga tidak mencari untung,” pungkas Sekjend Wanita Islam Al-khairaat ini mengakhiri

## Terima Audiensi Mahasiswa

# Slamet Siap Tolak RUU Cipta Kerja

Saya mengapresiasi langkah mahasiswa yang notabene memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mahasiswa memang sudah seharusnya menjadi kekuatan ekstra-parlementer kita

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (05/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, menerima audiensi dan dialog yang dilakukan oleh mahasiswa Sukabumi, Selasa (04/08/2020) di Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayang Plus (HMI Cabang Sukabumi, PC IMM Sukabumi Raya, GMNI Cabang Sukabumi Raya, PC PMII Kota Sukabumi) dan PB HIMASI tersebut, menuntut dicabutnya RUU Cipta Kerja dari prolegnas 2020.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari beberapa aksi

demo yang sebelumnya telah dilakukan.

"Saya mengapresiasi langkah mahasiswa yang notabene memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mahasiswa memang sudah seharusnya menjadi kekuatan ekstra-parlementer kita," kata Slamet kepada awak media usai audiensi berlangsung.

Slamet menuturkan, dirinya setuju dengan apa yang diinginkan mahasiswa terkait penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Slamet menyebut, RUU kontroversial tersebut memang cenderung memberi karpet merah kepada investor.

"Secara pribadi saya sepakat dengan mahasiswa agar RUU Cipta Kerja ini dicabut dari prolegnas 2020. InsyaAllah sikap pribadi saya ini akan saya pertanggungjawabkan di Fraksi," jelas Slamet

Audiensi dan dialog tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Mohamad Muraz, dan Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, serta sejumlah Anggota DPRD Kota Sukabumi lainnya.



# Catatan Politisi PKS Terkait Omnibus Law untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pemerintah sering mengumandangkan 'perbaikan iklim investasi' namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (08/08) — Omnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar omnibus law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut Doktor lulusan Universitas Airlangga ini, Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan.

"Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan 'perbaikan iklim investasi' namun tidak menerangkan

secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia," ungkap Anis.

Kedua, lanjutnya, Pemerintah menganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi COVID-19.

Namun menurut Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini, perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar.

"Ketiga, diantara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di

World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64," terangnya.

Peringkat ini, kata Anis, kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93.

"Sementara RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja," pungkasnya.

Berdasarkan data ini, Anis menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan.

Keempat, tambah Anis, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

"Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang pro-



duktivitas pekerja," ulas Anis.

Kelima, katanya, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempermudah investasi.

"Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru," tegas Anis.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.

Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang di rilis oleh Transparency International.

"Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19," tutup Anis mengakhiri.

# Beberapa Titik Kelemahan RUU Ciptaker



**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

- 1 Minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan 'perbaikan iklim investasi' namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.
- 2 Pemerintah menganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi COVID-19.
- 3 diantara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64.
- 4 Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regu-lasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamen-tal. Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang su-dah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja
- 5 Jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru

Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental. Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja

# شاركت كتلة حزب العدالة والرفاهية تعاطفه مع سقوط ضحايا انفجار بيروت في لبنان.



هذه الكارثة كارثة إنسانية راح ضحيتها العديد من الضحايا. يجب ألا يقف العالم مكتوف الأيدي ويتترك لبنان يعمل بمفرده.

## الدكتور جزولي جويني

رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب الاندونيسي

الاولى من برلمان اندونيسي ، وزارة الخارجية من خلال السفارة الاندونيسية في لبنان لتكون قادرة على المشاركة في تقديم المساعدة والخدمة للضحايا وعائلاتهم. قال جزولي الجويني: من المناسب لنا كأمة متحضرة وإنسانية أن نشارك في التعامل مع مساعدة وخدمة الضحايا وأسره ، وأنشد وزير الخارجية الاندونيسي أن يعمل السفارة الاندونيسية في لبنان كمرکز لمساعدة ضحايا الانفجار .

لكن هذا لا يكفي أن تتولى دولة واحدة وحدها. لذلك يجب إشراك العالم الإسلامي بشكل خاص والهيئات العالمية تحت رعاية الأمم المتحدة بشكل عام

جاكرتا (٥/٨) - يأسف رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية بشدة لمقتل وإصابة الانفجار العنيف الذي وقع في ميناء بيروت اللبناني يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ١٣٧ شخصاً وإصابة حوالي ٥٠٠ آخرين ، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.

وقال جزولي الجويني "شارك التعاطف والحزن العميق على الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار ٢٧٥٠ طناً من نترات الأمونيوم غير الآمنة المخزنة بالقرب من حظيرة الميناء. ونأمل أن يتم منح الضحايا القتلى مكاناً مناسباً إلى جانب الله تعالى وقد يتم علاج الضحايا المصابين قريباً".

ناشد عضو من أعضاء اللجنة

# HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas

“Pemerintah Indonesia dengan tetap menghargai urusan dalam Negeri Lebanon, bisa mengupayakan hal-hal yang terukur untuk mendorong agar ledakan itu diusut secara tuntas, dan mengajak masyarakat Internasional untuk membantu Lebanon

## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (07/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid prihatin dan menyampaikan bela sungkawa kepada Pemerintah Lebanon dan warga Lebanon atas ledakan dahsyat yang terjadi di kawasan pelabuhan Beirut, yang menjatuhkan banyak korban dan kerugian yang tak terhingga. Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, kejadian di Lebanon harus segera diusut tuntas dan transparan, sehingga terlepas dari apapun sebabnya, siapa-pun pelakunya dan apapun motifnya.

“Agar tidak terulang dan yang bertanggung jawab ataupun terlibat dikenai sanksi hukum yang keras,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (06/08/2020)

HNW sapaan akrabnya yang juga anggota DPR dari dapil Jakarta II (meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri) meminta agar Pemerintah Republik Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, tetap waspada dan fokus melindungi Warga Negara Indonesia pasca ledakan dahsyat di negara

tersebut.

Hidayat pun menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kesigapan Dubes dan Perwakilan Indonesia di Lebanon.

“Alhamdulillah, Dubes RI untuk Lebanon melaporkan bahwa 1447 WNI selamat dari Ledakan di Beirut. Satu WNI yang sempat dikarantina juga selamat,” ujarnya.

HNW berharap agar Kedubes RI untuk Lebanon dapat menjalankan perannya secara maksimal untuk terus melindungi WNI pasca ledakan dahsyat tersebut, dan juga untuk peduli dengan membantu Pemerintah dan warga Lebanon yang terkena musibah tersebut.

Selain itu, Pemerintah RI juga semoga bisa menugaskan pasukan penjaga perdamaian RI di Lebanon untuk sementara membantu penanganan dampak dari ledakan dahsyat itu.

Menurut HNW, sekalipun kewaspadaan harus tetap dijaga, karena kesimpangsiuran penyebab dari ledakan yang dahsyat itu masih terus terjadi.

Presiden dan Perdana



Menteri Lebanon menyebutkan bahwa ledakan itu berasal dari gudang yang menyimpan 2750 ton amonium nitrat yang tersimpan secara tidak aman selama kurang lebih enam tahun.

Sedangkan, Presiden Amerika Serikat sempat menyebut ledakan itu sebagai serangan bom. Sementara, otoritas Israel buru-buru menyatakan tidak terlibat.

“Apapun penyebabnya, dan siapapun pelaku atau yang bertanggung jawab, kita semua turut berduka cita. Dan penting untuk segera diusut tuntas secepatnya dan setransparan mungkin. Agar tak jadi trend

dan/atau dendam mensejarah, yang makin memberatkan kondisi sosial, ekonomi, keamanan dan politik di kawasan, apalagi ditengah pandemi covid-19,” ujarnya.

Hidayat juga berharap Pemerintah Indonesia juga dapat memainkan peranannya.

“Pemerintah Indonesia dengan tetap menghargai urusan dalam Negeri Lebanon, bisa mengupayakan hal-hal yang terukur untuk mendorong agar ledakan itu diusut secara tuntas, dan mengajak masyarakat Internasional untuk membantu Lebanon,” pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# *Selamat* **Hari Veteran Nasional**

10 Agustus 2020

*Terima kasih pejuang atas segala pengorbananmu.  
Kami akan mengisi dan menjaga apa yang telah  
kau perjuangkan.*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# RUU Cipta Kerja dapat Melemahkan Peran Komisi Penyiaran Indonesia

“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten”

## Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (09/08) — Wakil Ketua Komisi I DPR-RI asal Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyihari, berpendapat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia.

Menurut Kharis, RUU Cipta Kerja yang memasukkan kandungan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten”

ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (09/08).

“Hal ini perlu dicermati, karena IPP mengharuskan Lembaga Penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI” tambah Kharis, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Menurutnya, regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.

“Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan

kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat” ujar Kharis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 79 draft RUU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58.

Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux.

Kharis berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermudah sistem penyiaran di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran” pungkasnya.



# Toriq Hidayat Tegas, Omnibus Law Tidak Boleh Mengancam Kedaulatan Bangsa

“Salah satu tujuan dari Omnibus Law adalah untuk kemudahan berinvestasi dengan cara memberikan kemudahan perizinan berusaha. Jika dilihat dari tujuan tersebut maka tidak ada yang salah, namun perlu diperhatikan norma-norma yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut”

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (06/08) — Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh Pemerintah dan saat ini sedang dibahas di DPR RI perlu menjadi perhatian kita semua. Masyarakat harus kritis terhadap Omnibus Law agar negara ke depannya bisa lebih baik dan sejahtera.

“Salah satu tujuan dari Omnibus Law adalah untuk kemudahan berinvestasi dengan cara memberikan kemudahan perizinan berusaha. Jika dilihat dari tujuan tersebut maka tidak ada yang salah, namun perlu diperhatikan norma-norma yang akan diterapkan untuk

mencapai tujuan tersebut”, ujar Toriq Hidayat.

Anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menyoroti tentang pasal yang terkait dengan Industri Pertahanan. Omnibus Law mengubah, menambah dan/atau menghapus beberapa pasal yang terdapat dalam suatu undang-undang.

“Salah satu UU yang akan diubah dalam Omnibus Law adalah UU nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tercatat sebanyak 11 pasal dalam UU itu akan diubah dan terdapat 1 pasal yang akan ditambahkan dalam

UU tersebut”, tambahnya.

Toriq menambahkan, anggota DPR harus hati-hati dalam menganalisa setiap pasal yang terkait dengan industri pertahanan kita. misalnya perubahan pasal 52 ayat (2) yang memungkinkan investor swasta asing dapat berinvestasi penuh dalam memenuhi kebutuhan industri pertahanan kita.

“kewenangan pemberian izin pengadaan alat pertahanan yang sebelumnya dari Menteri Pertahanan yang kemudian berubah menjadi wewenang pemerintah pusat. Peralihan wewenang ini menimbulkan ketidakjelasan K/L mana yang memberikan izin pengadaan alat pertahanan”, ungkapnya.

Selanjutnya Toriq menegaskan bahwa Kedaulatan bangsa dalam pembahasan Omnibus Law ini sangat dipertaruhkan. Kemudahan berinvestasi yang menjadi tujuan dari Omnibus Law ini tidak boleh mengancam Kedaulatan bangsa kita. Masyarakat kita harus sejahtera sekaligus harus berdaulat.



# Wakil Ketua FPKS: Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon

Kita harapkan KBRI di Lebanon terus memantau kondisi WNI dan memberikan bantuan yang memadai jika diperlukan. Mengingat peristiwa ledakan ini mungkin akan membuat situasi krisis di Lebanon lebih buruk. KBRI perluantisipasi hal ini, meski kita tentu tidak berharap hal ini terjadi

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (07/08) — Menanggapi peristiwa ledakan yang terjadi di pelabuhan Beirut (04/08/2020) yang menyebabkan sedikitnya 135 korban jiwa dan 5000 orang alami luka-luka, Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan yang mendalam.

Menurut Sukamta, peristiwa ini tentu akan menambah derita masyarakat Lebanon yang tengah dirundung krisis

politik dan ekonomi serta pandemi Covid-19.

Untuk itu menurutnya, Indonesia perlu memberikan bantuan untuk meringankan derita masyarakat Lebanon yang menjadi korban ledakan. Demikian pesan tertulis disampaikan Sukamta kepada media (07/08).

"Meski saat ini Indonesia juga sedang alami kondisi ekonomi yang berat akibat pandemi Covid-19, saya kira

tetap perlu kita sebagai negara sahabat memberikan bantuan kepada masyarakat Lebanon yang menjadi korban ledakan. Dalam hal ini Kedubes RI di Lebanon bisa memberikan ilustrasi kebutuhan apa saja yang diperlukan disana," ungkapnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga memberikan apresiasi kepada Kedubes RI di Lebanon yang telah bertindak cepat untuk memantau kondisi WNI di sana. Apresiasi juga diberikan Sukamta kepada Kontingen Garuda yang tergabung dalam Misi Perdamaian PBB UNIFIL yang ikut membantu penanganan pasca ledakan dengan melakukan evakuasi korban.

"Kita harapkan KBRI di Lebanon terus memantau kondisi WNI dan memberikan bantuan yang memadai jika diperlukan. Mengingat peristiwa ledakan ini mungkin akan membuat situasi krisis di Lebanon lebih buruk. KBRI perlu antisipasi hal ini, meski kita tentu tidak berharap hal ini



terjadi," tegas Sukamta.

Menurut Sukamta, peristiwa ledakan yang diduga terkait penyimpanan 2.700 ton amonium nitrat secara tidak aman ini juga perlu menjadi kewaspadaan supaya tidak terjadi di Indonesia.

"Beberapa peristiwa serupa pernah terjadi, seperti di Tianjin China pada tahun 2015, Ryeongchon Korea Utara tahun

2004 dan di Texas Amerika Serikat pada 1947. Saya kira pemerintah perlu pastikan jika ada penyimpanan zat yang mudah meledak, harus tersimpan sesuai standar pengamanan dan ditempatkan di gudang yang jauh dari permukiman penduduk," tutup Sukamta.



FRAKSI PARTAI Keadilan  
SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Launching Buku Memoar  
Pilkada 2017

# Mardani : Sebagai Pertanggungjawaban Publik

“Bagaimana saya menilai Mas Anies secara pribadi, Bang Sandi Secara Pribadi, dan tokoh-tokoh lainnya dalam tujuan untuk mencatat sejarah sebagai pengingat. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk orang banyak

**Dr. H. Mardani, M.Eng.**  
Anggota Komisi II DPR RI



## Launching Buku Memoar Pilkada 2017

# Mardani: Sebagai Pertanggungjawaban Publik

'Buku Memoar Pilkada DKI 2017 saya dedikasikan untuk masyarakat setelah memuntaskan amanah sebagai ketua tim pemenang

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (10/08) — Mantan Ketua Pemenangan Pasangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera melaunching buku di balik dapur kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017.

Mardani mengatakan akan banyak menceritakan di balik dapur bagaimana kemenangan Aniw-Sandi tahun 2017 dari perspektif ketua tim pemenang.

"Insya Allah Saya akan melaunching buku pada hari senin (10/08) yang menceritakan di balik kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan akan banyak bagaimana strategi dan drama pesta demokrasi yang cukup kompetitif itu," kata Mardani, Senin (10/10).

Mardani mengatakan membuat buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, "Buku Memoar Pilkada DKI 2017 saya dedikasikan untuk masyarakat setelah memuntaskan amanah sebagai ketua tim pemenang," ujarnya.

Anggota DPR Dapil DKI I ini mengatakan sebagian besar isinya ingin mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat membantu kemenangan Mas Anis dan bang Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu.

Selain itu, ini juga la katakan menuliskan pengalaman pribadinya bagaimana ia menilai secara personal para tokoh-tokoh perjuangan itu.

"Bagaimana saya menilai Mas Anies secara pribadi, Bang

Sandi Secara Pribadi, dan tokoh-tokoh lainnya dalam tujuan untuk mencatat sejarah sebagai pengingat," kata Mardani.

Mardani berharap buku ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang yang sedang berjuang dan atau akan berjuang di kontestasi demokrasi.

"Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk orang banyak," pungkask Mardani.

Launching buku ini dihadiri Anies Baswedan, Sandiaga uno, dan Rocky gerung serta Mardani Ali Sera melalui aplikasi teleconference secara daring .





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

TUMPANG TINDIH PENGOLAHAN  
PERHUTANAN SOSIAL

# Memicu Bencana Jangka Panjang

Ada perubahan yang relatif signifikan pada ekosistem kawasan hutan kita. Ini dampaknya selain merubah lingkungan dalam hutan, juga merubah lingkungan kawasan sekitar hutan. Kawasan hutan dibabat orang-orang tak bertanggung jawab. Hutan disulap jadi perkebunan. Tak ada lagi tanaman yang menyerap air. Ini terjadi sudah belasan tahun sejak tahun 1998 hingga sekarang

**Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI





# Tumpang Tindih Pengolahan Perhutanan Sosial Memicu Bencana Jangka Panjang

Ada perubahan yang relatif signifikan pada ekosistem kawasan hutan kita. Ini dampaknya selain merubah lingkungan dalam hutan, juga merubah lingkungan kawasan sekitar hutan. Kawasan hutan dibabat orang-orang tak bertanggung jawab

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (10/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan Pemerintah pentingnya pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki kekuatan strategis mulai dari Sosial, Budaya, Ekonomi, Lingkungan hingga Keamanan.

Saat ini menurut Akmal, pengelolaan perhutanan Sosial masih mengalami tumpang tindih di beberapa wilayah.

"Ada yang sudah bagus pengelolannya, tapi sebagian besar masih perlu perbaikan untuk menemuh harmonisasi masyarakat yang hidup sekitar

hutan dan kepentingan negara", pungkasnya.

"Ada perubahan yang relatif signifikan pada ekosistem kawasan hutan kita. Ini dampaknya selain merubah lingkungan dalam hutan, juga merubah lingkungan kawasan sekitar hutan. Kawasan hutan dibabat orang-orang tak bertanggung jawab. Hutan disulap jadi perkebunan. Tak ada lagi tanaman yang menyerap air. Ini terjadi sudah belasan tahun sejak tahun 1998 hingga sekarang", tegas Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, diberba-

gai wilayah seperti di Kabupaten Wajo yang telah terjadi Banjir merupakan akibat perubahan lingkungan hutan yang biasanya mampu menahan dan menyerap air dalam jumlah besar, kini tak mampu lagi.

"Di musim Kemarau, rakyat kekurangan air. Bencana lain yang rutin muncul selain banjir adalah juga disertai longsor saat musim penghujan," ungkapnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, bahwa negara memiliki kewenangan sangat besar pada mengatur pengelolaan hutan yang terimplementasi pada pelaksanaan tugasnya di KLHK hingga BUMN.

"Dengan besarnya kewenangan ini, pemerintah mesti berlaku sebijak-bijaknya sesuai aturan yang ada. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan seluruh kawasan hutan dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tandas Akmal.



Dalam mengelola hutan, lanjutnya, Perum Perhutani memiliki kewenangan penataan dan perencanaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pemanfaatan terkait rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan kawasan hutan. Sedangkan menunjuk dan menetapkan kawasan hutan menjadi kewenangan KLHK.

"Mesti diperhatikan dengan seksama, bahwa seluruh aktivitas kenegaraan termasuk pengelolannya ini untuk kemakmuran rakyat. Susuai dengan Undang-Undang Dasar, Sesuai dengan Undang-Undang. Jangan sampai ada penyelewengan apalagi hingga menimbulkan kerusakan jangka panjang', kritis Akmal.

Akmal menggambarkan, Saat ini secara ekonomi, sektor perhutanan sosial telah menunjukkan aktivitas yang cukup potensial. Padahal pengelolannya masih cenderung tradisional. Sebagai contoh dalam satu propinsi di kawasan hutan di tahun 2019 hingga 2020, Kontribusi atas Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp 47 miliar. Pungutan sumber daya hutan untuk kegiatan produksi tebang dan sadap pinus Rp 2 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk komoditas produksi di kawasan hutan sebesar Rp 147 juta.

Selengkapnya kunjungi

fraksi.pks.id

# Aleg PKS Dorong Pemerintah Jadikan Sektor Pertanian Penyelamat Resesi Ekonomi

Saya mendorong Pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif penyelamat Indonesia dari resesi ekonomi, karena telah terbukti sektor pertanian berkontribusi paling tinggi dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita selama masa pandemi ini

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (07/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Indonesia kuartal II tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%.

Dengan kondisi saat ini, Johan berharap Pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal III nanti agar menjadi positif.

"Saya mendorong Pemerintah untuk menjadikan sektor

pertanian sebagai lokomotif penyelamat Indonesia dari resesi ekonomi, karena telah terbukti sektor pertanian berkontribusi paling tinggi dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita selama masa pandemi ini", urai Johan.

Politikus dari PKS ini menjelaskan berdasarkan data dari BPS, bahwa sektor pertanian telah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada kuartal II tahun 2020, yaitu tumbuh sebesar 16,24%.

"Artinya ke depan Pemerintah mesti menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan cara mengandalkan pertanian untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuat kebijakan untuk membuka ruang sektor pertanian dalam arti luas untuk terus tumbuh dan bergerak," papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mengungkapkan bahwa telah banyak para pakar dan akademisi yang menyarankan agar sektor pertanian menjadi prioritas pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari ambang resesi ekonomi.

"Untuk itu, Pemerintah harus segera membuat kebijakan penambahan anggaran yang signifikan untuk mendorong sektor pertanian, termasuk di dalamnya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan menjadi kunci penting menuju pemulihan ekonomi nasional," tegas Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat bahwa



saat ini perlu penguatan industri pertanian di dalam negeri dan menghilangkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor.

"Hal ini merupakan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya resesi ekonomi, di samping itu perlu adanya program sustainabilitas sektor pangan sebagai kunci dari sustainabilitas perekonomian agar kita memiliki ketahanan pangan sebagai bagian strategis dari ketahanan nasional kita," tukas Johan.

Johan mengkritik pemerintah yang banyak memberikan stimulus kepada korporasi atau perusahaan besar tapi ternyata tidak berdampak pada peningkatan produksi dalam negeri.

"Maka sebaiknya sekarang pemerintah fokus menggenjot sektor pertanian dan memberikan proteksi harga komoditas pertanian supaya harga yang diterima petani tidak anjlok dan semoga daya beli masyarakat akan meningkat," tutup Johan.

# Anggota Fraksi PKS: Rakyat sedang Susah, Tunda Kenaikan Tarif Tol

Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Syaikhul menjelaskan, seharusnya yang Pemerintah lakukan adalah memberikan insentif agar laju pertumbuhan yang terus menurun dapat ditahan agar tidak semakin menurun.

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (08/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menambah beban baru rakyat di tengah situasi ekonomi yang memburuk.

"Kenaikan ini harus ditunda. Jangan tambah beban baru bagi rakyat yang sedang susah," kata Syaikhul.

Seperti diberitakan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menaikkan tarif tol Belmera

sepanjang 34 Km, dihitung mulai hari Kamis (13/08) pukul 00.00 WIB. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1246/KPTS/M/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, tarif tol juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja. Selain itu akan ada beberapa penyesuaian tarif tol di ruas-ruas lainnya.

Melihat kondisi ekonomi yang sedang merosot yang ditandai pertumbuhan ekonomi

pada kuartal II-2020 minus 5,32%, sesungguhnya apa yang dilakukan Pemerintah ini justru memperparah keadaan.

Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Syaikhul menjelaskan, seharusnya yang Pemerintah lakukan adalah memberikan insentif agar laju pertumbuhan yang terus menurun dapat ditahan agar tidak semakin menurun. Apalagi menurut data BPS, sektor transportasi dan perdagangan mendapatkan pukulan yang paling telak, hingga mengalami pertumbuhan -30,84%.

"Berikan insentif pada sektor transportasi. Bukan malah menaikkan tarif tol. Ini jelas aneh," tegas Syaikhul.

Apalagi kata Anggota F-PKS DPR RI itu, kenaikan tarif Golongan II sebesar 15,38%, dari yang semula sebesar Rp 13.000,- menjadi Rp 15.000,- sangat memberatkan. Sebab, pemilik kendaraan jenis ini di dominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV dan V (yang seka-



rang menjadi Golongan III) yang kebanyakan dimiliki oleh korporasi.

"Sudah jelas ini akan sangat memberatkan. Karena kenaikan tarif tol ini seperti menyasar pelaku UMKM," kata Syaikhul.

Angka kenaikan bagi golongan II ini juga melebihi angka inflasi untuk wilayah Kota Medan periode 1 November 2017 - 31 Oktober 2019 sebesar 5,72 %. Sehingga hal ini jelas melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dimana kenaikan tarif tol tidak boleh melebihi angka

inflasi tersebut.

Melihat hal itu, Syaikhul sekali lagi menegaskan Pemerintah harus menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil. Apalagi operator jalan tol merupakan BUMN yang mayoritas dimiliki oleh Pemerintah sendiri.

"Tunda kenaikan. Agar tidak menambah beban terhadap sektor transportasi dan perdagangan yang telah sangat terpuak oleh Pandemi Covid-19 ini," tegas Syaikhul.

## Jokowi Heran Banyak Bandara Internasional

# Aleg PKS: Aneh, Presiden Protes Kinerjanya Sendiri

Yang menetapkan status bandara internasional itu pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal. Aneh, sekarang kok protes hasil kinerjanya sendiri. Ini menunjukkan kalau kalau presiden tidak paham fungsi pemerintah sebagai regulator

### Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Surabaya (10/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan banyaknya bandara internasional sebagai bentuk ketidakpahaman akan tugas dan fungsi pemerintah sebagai regulator.

"Yang menetapkan status bandara internasional itu pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal. Aneh, sekarang kok protes hasil kinerjanya sendiri. Ini menunjukkan kalau kalau presiden tidak paham fungsi pemerintah sebagai regulator," kata Sigit.

Menurut Sigit, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 39 tahun 2019 tentang Tata Nasiona kebandarudaraan Nasional penetapan bandara internasional dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian.

Penetapan tersebut didasari berbagai pertimbangan seperti Rencana Induk Nasional Bandar Udara, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata, pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan. Seperti diketahui, Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada

Kamis (6/8/2020), Presiden Jokowi mempertanyakan urgensi bandara internasional yang jumlahnya mencapai 30 bandara.

Presiden menilai jumlah bandara internasional terlalu banyak. Pemerintah juga berencana mengurangi jumlah bandara internasional yang ada.

Wacana pemerintah memfokuskan penerbangan internasional di delapan bandara potensial superhub menurut Sigit kontraproduktif dengan rencana pemerintah memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat Covid-19.

"Pengurangan bandara internasional berpotensi merugikan daerah. Pemda yang sudah ikut berjuang membangun bandara internasional dan akomodasi untuk sektor pariwisata akan merasa dirugikan. Seharusnya wisatawan dan masyarakat bisa langsung terbang ke rute internasional, terpaksa harus transit ke bandara internasional di daerah lain. Hal ini tidak hanya akan mengurangi mobilitas, tapi juga menambah biaya perjalanan," kata Sigit.



Karena itu, Sigit meminta pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif jika akan mengurangi bandara internasional disejumlah daerah. Terlebih penetapan bandara internasional tersebut sudah masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

"Perlu kajian mendalam

jika ingin mengurangi bandara internasional dan memfokuskan penerbangan internasional pada 8 bandara yang berpotensi menjadi superhub. Jangan sampai ada daerah yang dirugikan, khususnya yang menjadi destinasi wisata." Kata Sigit.



## Indonesia di Ambang Resesi

# Aleg PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

“Pemerintah harus all out membantu UMKM agar bangkit. Jika dianggap unbankable, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena mereka kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja

### AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (06/08) — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Quartal II/2020 mengalami kontraksi (minus) 5,32% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Artinya Indonesia berada diambang resesi, jika pada Quartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyoal Pemerintah dalam membangkitkan per-

ekonomian nasional, padahal pemerintah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menahan anjaknya perekonomian nasional.

“Anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar dengan dana stimulus mencapai Rp 695,2 triliun, hingga awal Agustus ini baru tercapai 20 persen saja,” ungkapnya.

Amin mendesak pemerintah untuk mengerahkan segala upaya (all out) untuk menyelamatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika ingin meredam laju resesi ekonomi. Kalaupun akhirnya terjadi resesi, namun jika UMKM bangkit dan kembali berputar

usahanya, Amin yakin resesi tidak akan berkepanjangan.

“Pemerintah harus all out membantu UMKM agar bangkit. Jika dianggap unbankable, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena mereka kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja,” tegasnya.

Anggota Komisi VI itu menyoal besarnya jumlah UMKM sudah memperoleh bantuan modal kerja. Sampai awal Agustus 2020, baru 617.324 debitur dari kalangan UMKM yang mendapat kredit modal kerja, atau sekitar 0,96% dari total 64 juta UMKM.

Padahal Pemerintah sudah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun dengan harapan Himbara mampu meningkatkan kredit yang dimodali pemerintah Rp 30 triliun menjadi Rp 90 triliun selama tiga bulan.

Menurut Amin, akibat lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM



harus berusaha mencari permodalan sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.

Padahal dengan dengan bangkitnya UMKM, laju penurunan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran bisa diredam, karena UMKM itu menjadi sandaran bagi 90% tenaga kerja nasional.

BPS melansir, konsumsi masyarakat anjlok hingga minus 6,51% dikarenakan daya beli masyarakat yang terus melorot. Jika dibedah, pada quartal I lalu, daya beli masyarakat anjlok sebesar 50% akibat pandemi Covid-19.

Namun sayangnya, dana besar stimulus alih-alih mampu

meremem laju penurunan, yang terjadi malah daya beli pada quartal II kembali anjlok sebesar 25% dibanding quartal I.

BPS juga merilis, tingkat konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, konsumsi pemerintah minus 6,9 persen, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) minus 7,76 persen.

Disisi lain, pertumbuhan industri transportasi dan sektor akomodasi dan industri makanan dan minuman tercatat kontraksi (minus) 29,22 persen dan minus 22 persen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Agar Berpihak pada Rakyat

# Anggota FPKS: Kami akan Terus Kawal Ratifikasi Perdagangan Internasional

“Sebagai anggota DPR RI Komisi VI, kami akan terus mengawal ratifikasi perjanjian internasional agar tetap berpihak kepada rakyat, UMKM, dan bisa berdampak positif bagi perekonomian Indonesia

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (10/08) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengatakan adanya perjanjian perdagangan internasional harus tetap dapat melindungi industri dalam negeri khususnya skala kecil dan menengah.

Politisi PKS ini menerangkan, pada awal Februari 2020 DPR RI menetapkan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut,

lanjut Nevi, merupakan salah satu RUU Prioritas tahun 2020 dalam kategori kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, sehingga dapat dibahas kapan saja dengan melihat kondisi tertentu.

“Sebagai anggota DPR RI Komisi VI, kami akan terus mengawal ratifikasi perjanjian internasional agar tetap berpihak kepada rakyat, UMKM, dan bisa berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.” ujar Nevi Zuairina.

Nevi melanjutkan, Selain perjanjian perdagangan IA-CEPA masih ada ratifikasi perjanjian

perdagangan dengan negara EFTA (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan juga Perjanjian Pengembangan Niaga Elektronik dengan negara se-ASEAN (ASEAN Agreement on E-Commerce).

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan, bahwa Fraksi PKS telah memberikan catatan terhadap ratifikasi perdagangan IA-CEPA.

“Ratifikasi ini akan membuka bebas aktifitas ekspor-impor antar kedua negara, sehingga bisa berdampak pada tarif bea masuk produk di kedua negara menjadi 0%,” ungkapnya.

Apabila hal ini terjadi, katanya, akan ada sebanyak 6.474 produk ekspor dari Indonesia ke Australia yang bea masuknya di nol persenkan, sedangkan Indonesia akan membebaskan bea masuk dari Australia sebanyak 10.813 pos barang impor.

“Untuk saat ini, pembebas-



an aktifitas ekspor-impor berupa bea masuk produk di kedua negara menjadi 0% mengakibatkan ketidak seimbangan. Keadaan ini menyebabkan adanya defisit neraca perdagangan bagi Indonesia, yang pada akhirnya bisa mengganggu perekonomian nasional,” katanya.

Nevi melanjutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2018 tercatat sebesar USD2,8 miliar dan impor dari Australia ke Indonesia sebesar USD5,8 miliar, sehingga Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia

sebesar USD3 miliar.

“Kedepannya, adanya kerjasama perdagangan IA-CEPA harus bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan. Oleh karenanya, Pemerintah harus dapat memperhatikan industri dalam negeri khususnya skala kecil dan menengah agar dapat memproduksi barang ekspor yang berkualitas.” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS itu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Tolak Omnibus Law

# Rafli: RUU Cipta Kerja Jangan Pangkas Kewenangan BPKS Sabang

Pemberlakuan RUU Cipta Kerja akan mereduksi kewenangan perizinan dalam bidang Perdagangan dan Industri sebagaimana diatur dalam PP No. 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

### RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Aceh (05/08) — Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang bergulir menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai berpotensi menghadirkan masalah baru pada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Sabang (BPKS).

Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI Rafli sebagai mitra kerja Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Sabang (BPKS) mengingatkan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdikasi masalah bagi institusi penunjang perekonomian bidang perdagangan dan pelayaran

tersebut.

"Dihapusnya fasilitas 'cukai' dalam RUU Cipta Kerja tentunya tidak sesuai dengan paradigma Free Trade Zone (FTZ). Dampak yang signifikan bagi BPKS sebagai lembaga negara Non Struktural yang di beri kewenangan untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang-undang dalam ruang lingkup kewenangan perizinan menjadi terbatas sehingga situasi ini berpotensi mengurangi sisi penerimaan negara dan dalam aspek yang lebih luas berpotensi mengganggu iklim investasi dan bisnis mengingat untuk pengembangan ekonomi kawasan kini memasuki fase pengembangan," ujar Rafli.

Rafli Mencontohkan sesuai dengan Pasal 5 PP No.83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang meliputi kewenangan perizinan dalam Bidang, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan; dan Penanaman modal.

"Pemberlakuan RUU Cipta Kerja akan mereduksi kewenangan perizinan dalam bidang Perdagangan dan Industri sebagaimana diatur dalam PP No. 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang" pungkas Rafli.

Seperti aturan Risk Based Approach (RBA), lanjutnya, pengaturan kriteria barang yang dilarang dan dibatasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan mengatur detail jenis barangnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan masalah yang berhasil di-inventori, sebagai legislator Rafli mengusulkan agar tetap memasukkan fasilitas cukai



dalam draf RUU Cipta Kerja tersebut.

"Kita usulkan Tetap memasukkan fasilitas cukai dalam draf RUU Cipta Kerja tersebut. Terkait dengan Rencana pembentukan RUU Cipta Kerja berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang - Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung

dengan Pemerintahan Aceh sebagaimana disebutkan pada Bab III Rencana Pembentukan Undang-Undang Pasal 6 ayat (1) yaitu Rencana Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan Konsultasi dan Pertimbangan DPRA. Hal ini mengingat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diatur juga didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," Jelas Rafli



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**HAKTEKNAS**

seperempat abad  
kebangkitan teknologi  
nasional

# MEMPERINGATI HARI TEKNOLOGI NASIONAL

10 Agustus 2020

Teruslah berinovasi  
Membangun Negeri

**Dr. H. Mulyanto, M.Eng.**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI  
Bidang Industrri dan Pembangunan

## Sambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

# Aleg PKS: Pemerintah Kurang Serius Tangani Riset Inovasi

Tanpa ada kejelasan bentuk kelembagaan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan riset yang selama ini berjalan. Program riset dan inovasi yang sudah direncanakan terancam tidak terlaksana karena tidak jelasnya aspek kelembagaan

### Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (10/08) — Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) setiap 10 Agustus diharapkan Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pencapaian riset dan inovasi nasional.

Peringatan itu harus dijadikan pemacu dan pemicu lahirnya hasil riset dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemennristek/BRIN), harus kreatif membuat berbagai terobosan baru agar penelitian, pengembangan,

pengkajian dan penerapan riset dan inovasi terus berkembang.

"Sebagai sebuah bangsa kita patut bangga dengan beragam pencapaian hasil riset dan inovasi yang sudah dihasilkan. Secara kualitas terbukti hasil riset dan inovasi anak bangsa mampu bersaing di kancah internasional," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Mulyanto, diperlukan dukungan yang konsisten dari Pemerintah agar keberhasilan yang sudah diraih dapat dikembangkan.

"Namun belakangan saya melihat Pemerintah seperti tidak serius membangun program inovasi teknologi nasional sebagai dasar keunggulan

kompetitif bangsa, baik dari aspek pendanaan maupun kelembagaannya," tutur Mulyanto yang pernah menjadi Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY.

Sampai hari ini saja, kata Mulyanto, bentuk kelembagaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas. Padahal Pemerintah berjanji akan menerbitkan Perpres tentang Kelembagaan BRIN di akhir tahun 2019.

"Tapi sampai memasuki semester II tahun 2020 pun, Perpres itu belum juga muncul," tegas doktor nuklir lulusan Tokyo Technology Institute.

Mulyanto menilai Perpres terkait BRIN ini sudah sangat mendesak.

"Tanpa ada kejelasan bentuk kelembagaan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan riset yang selama ini berjalan. Program riset dan inovasi yang sudah direncanakan terancam tidak terlaksana karena tidak jelasnya aspek kelembagaan," paparnya..

Mulyanto menambahkan, penundaan ini mencerminkan Pemerintah tidak punya political



wil untuk membangun inovasi nasional.

"Semestinya sesuai fatsun yang ada, Pemerintah tidak menunda selama ini. Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional. Karena itu di kalangan peneliti senior, muncul kegamangan mengenai ketidakjelasan eksistensi lembaga mereka, termasuk kesan politisasi lembaga inovasi," tandasnya.

Terkait dengan anggaran litbang, Mulyanto juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah tersebut. Untuk riset vaksin Covid-19, misalnya, melalui Konsorsium Riset Nasional, ternyata hanya dialokasikan dana litbang sekitar 20-an miliar.

"Ini tidak ada apa-apanya

dibandingkan dana pengembangan vaksin Covid-19 dari Sinovac. Karenanya jangan heran kalau akhirnya nanti bangsa ini merogoh kocek triliunan rupiah untuk membeli vaksin impor dari Cina itu. Kita masih senang menjadi bangsa 'pembeli', ketimbang bangsa 'pembuat'," tegas Mulyanto.

Sementara, lanjutnya, tantangan pembangunan kita semakin lama semakin berat dan peran riset-inovasi menjadi semakin vital. Medan kompetisi produksi telah bergeser dari keunggulan SDA (comparative advantage) menuju pada keunggulan bersaing (competitive advantage).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Banyaknya Aduan ke KPAI terkait PPDB 2020

# Aleg PKS: Fokus pada Psikologi Anak

“KPAI harus fokus dalam mengamati kasus PPDB ini, harus ada langkah tepat dalam menyelesaikannya terutama dalam hal psikologis anak yang terganggu nantinya.

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyoroti banyaknya permasalahan pada PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahun 2020.

“Belakangan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 224 pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020,” ungkap Iskan.

Iskan mengatakan, pengaduan ini sebagian besar memang terjadi di wilayah pulau Jawa khususnya ibukota Jakarta yang berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia.

“Banyak para orang tua berkeluh kesah tentang kesedihiannya karena anak-anaknya terputuk secara psikologis karena tidak diterima

di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda. Padahal pada banyak kasus, rumahnya berdekatan dengan sekolah yang dituju,” ungkap iskan

Permasalahan ini, lanjut iskan, akan berdampak pada psikologis anak.

“KPAI harus fokus dalam mengamati kasus PPDB ini, harus ada langkah tepat dalam menyelesaikannya terutama dalam hal psikologis anak yang terganggu nantinya. Masa iya, si anak punya skill dan kemampuan baik, hanya karena permasalahan usia, tidak bisa masuk sekolah yang dituju. Terus, apa mungkin mereka harus mengganggu setahun atau memilih sekolah swasta, yang notabene harus

mengeluarkan biaya sekolah yang jauh lebih mahal?” Tanya iskan

Berdasarkan pengawasan dan pengamatan KPAI menyimpulkan dan mengakui adanya permasalahan PPDB tahun 2020 dikarenakan Masih banyak daerah terlambat membuat juknis PPDB; Minimnya sosialisasi PPDB 2020, Kalaupun sosialisasi dilakukan, ternyata tidak efektif sehingga masih menimbulkan kebingungan para orangtua. Hal ini dapat dipahami juga karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga sosialisasi daring masih banyak kendala.

Masalah PPDB muncul juga ditimbulkan karena penafsiran zona yang berbeda serta penafsiran daerah yang tidak sesuai dengan juknis Permendikbud No.44/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.

Legislator PKS ini juga mengungkapkan keprihatinannya terkait ada beberapa kasus anak yang sampai depresi bahkan sampai meninggal dunia dikarenakan tidak lolos PPDB lantaran



permasalahan usia.

“Mungkin pikir, stres, terus asam lambungnya naik, kemudian meninggal dunia. Padahal si anak Berumur 14 tahun sembilan bulan, hanya kurang berapa bulan gitu dari 15 tahun. Itu salah satu kasus beberapa waktu yang lalu setelah si anak dinyatakan tidak

lolos PPDB di wilayah Ibukota Jakarta. Miris melihat kondisi seperti ini, saya yakin masih banyak di luar sana anak-anak yang terganggu psikologisnya dan pemerintah harus segera hadir memberikan solusi terbaik, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” pungkasnya

# PKS LEGISLATIVE CORNER

MEMBAHAS ISU DARI  
SUDUT YANG PAS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## Live Interactive

Bersama Anggota  
Legislatif PKS

**SAKSIKAN  
SETIAP JUM'AT**

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Inpres Sanksi Protokol Kesehatan

# Netty: Asal Jangan Rakyat Disanksi, Pejabat dapat Dispensasi

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan loby-loby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan.

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (07/08) — Inpres No. 6 tahun 2020 meminta Kepala Daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Menurut Netty Prasetyani Aher, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, jika pemerintah hanya berwacana dan tidak memberikan keteladanan, jangan salahkan jika terjadi pembangkangan sosial.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan loby-loby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi

banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” ujar Netty dalam keterangan medianya, Kamis (06/08/2020).

Oleh karena itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

“Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Pastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi. Ada juga petugas yang siap mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya. Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor Pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ujar Netty.

Selain itu, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. “Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan



seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tiba-tiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif,” jelasnya.

Soal jenis sanksi, Netty juga tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti

menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tutup Netty

## Niat Baik Pemerintah Harus Komprehensif

# Mufida Ingatkan Bantuan untuk Korban PHK

"Ini baru usulan dan janji yang dikeluarkan pemerintah. Kita ingin tanya, insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah berjuang hingga mempertaruhkan nyawa itu apa sudah terealisasi dengan baik? Sebaiknya jangan kerap melempar janji PHP dan program yang kemudian tidak terealisasi dengan baik

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta – Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan kepada para Pekerja swasta (Non-BUMN) dengan penghasilan di bawah Rp 5 Juta per bulan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memberikan catatan agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada pekerja yang tidak tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja informal, pekerja outsourcing, Pekerja Bukan Penerima Upah (PbPU) dan

pekerja lain yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mencatat insentif yang akan diberikan pemerintah tersebut merupakan niat baik untuk memberikan stimulan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, ungkap Mufida, pemerintah harus punya strategi komprehensif dan tidak parsial dalam membantu para pekerja terdampak Pandemi saat ini.

Pemerintah harus segera memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah pengangguran baru dari

gelombang PHK akibat pandemi, dengan mencari solusi agar mereka mendapat pekerjaan baru atau tetap memperoleh penghasilan.

"Selain hanya menjangkau 13 juta pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada langkah nyata untuk pekerja lain seperti apa? padahal bisa jadi mereka jauh lebih terpuruk," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Mufida meminta pemerintah benar-benar menjalankan sebuah program dengan data yang akurat. Jangan sampai anggaran penanggulangan Covid-19 yang besar diwujudkan dalam sebuah program yang tidak tepat sasaran seperti kasus pelatihan kartu prakerja.

"Ini baru usulan dan janji yang dikeluarkan pemerintah. Kita ingin tanya, insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah berjuang hingga mempertaruhkan nyawa itu apa sudah terealisasi dengan baik? Sebaiknya jangan kerap melempar janji PHP dan program yang kemudian tidak terealisasi dengan



baik," kata Mufida menegaskan.

Mufida meminta untuk program pemberian insentif kepada pekerja, pemerintah harus melibatkan dan membuka dialog terbuka dengan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha. Dialog secara transparan ini untuk melihat program bantuan apa yang paling tepat diberikan kepada pekerja.

"Jangan jadikan program ini komoditas politik untuk

memuluskan RUU Cipta Kerja di kalangan teman-teman pekerja. Serikat pekerja sudah banyak memberikan catatan bahkan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Fokus berikan bantuan ini kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan akibat kesulitan selama Pandemi. Itu harus dijaga," tukas Mufida.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Alihkan Anggaran  
Miliaran POP

# Untuk Hotspot Internet Gratis

Program organisasi penggerak (POP) yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan. Organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menya-takan mundur dari kepesertaan program tersebut.

**“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



# Aleg PKS Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

“Penghapusan pasal pidana dalam draft RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktik pemalsuan ijazah

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (09/08) — Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan point-point pendidikan di dalamnya berpotensi melegalkan praktik pemalsuan ijazah.

Praktik pemalsuan ijazah dimungkinkan karena pasal pidana dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 67, 68 dan 69 dihapus.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mengkritik keras dihapusnya pasal-pasal sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja.

“Penghapusan pasal pidana dalam draft RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan

sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktik pemalsuan ijazah,” ungkap Sakinah melalui WhatsApp disela-sela kegiatan reses di Sulawesi Tengah, Minggu, (09/08).

Menurut Sakinah, RUU Cipta Kerja sangat merugikan dunia pendidikan, karena dalam RUU ini membuka peluang untuk melegalkan praktik pemalsuan ijazah.

“Konsekwensi dari penghapusan pasal sanksi pidana atas praktik pemalsuan ijazah adalah tidak adanya ancaman pidana bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berani memalsukan

ijazah. Ini seakan melegalkan praktik pemalsuan ijazah,” kata Sekjend Wanita Islam Al-Khairaat.

Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini menjelaskan bahwa adanya pasal sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah masih tidak membuat jera palakunya apalagi jika ditiadakan sanksi pidananya.

“Adanya sanksi yang berat saja masih ada praktik pemalsuan ijazah, apalagi jika sanksinya dihapus. Saya khawatir ijazah aspal bakal marak kembali,” pungkas anggota DPR RI Komisi X.



# Lembaga Pendidikan Swasta Makin Menjerit di Tengah Pandemi

banyak guru sekolah di lembaga pendidikan swasta mulai terhambat memperoleh gaji, bahkan beberapa sekolah swasta juga terancam tutup karena kekurangan murid

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (06/08) — Pukulan efek pandemi Covid-19 terus menyentuh berbagai bidang termasuk dunia pendidikan. Terlebih lembaga pendidikan swasta yang berjuang secara swadaya dalam memenuhi operasional kesehariannya. Hal ini, menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah.

"Mayoritas lembaga pendidikan swasta mengandalkan pemasukan SPP sebagai penggerak roda operasional, sementara saat ini banyak orangtua juga terdampak pandemi hingga kesulitan membayar SPP. Maka banyak guru sekolah di lembaga pendidikan swasta mulai terhambat memperoleh gaji, bahkan beberapa sekolah swasta juga terancam tutup karena kekurangan murid."

Kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini usai bertemu dengan beberapa guru sekolah swasta di tengah kegiatan masa resesnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi

Jumlah sekolah swasta dan jumlah peserta didik di sekolah swasta di Indonesia memang sangat besar, ada lebih dari 50 ribu sekolah swasta tingkat SD sampai SMA/SMK dari total 200 ribuan sekolah di Indonesia. Bahkan untuk level pendidikan SMA dan SMK, jumlah sekolah swasta lebih banyak. Tercatat ada 50, 23 % SMA Swasta dan 74,56% SMK Swasta pada tahun ajaran 2018/2019.

"Persoalan yang kini semakin terasa berat dihadapi oleh lembaga pendidikan swasta adalah persoalan biaya

operasional sekolah, penggajian guru, hingga kekurangan murid." kata Ledia

Dari perbincangan dengan beberapa kepala sekolah, guru, serta pengurus yayasan dari lembaga pendidikan swasta di Kota Bandung dan Kota Cimahi, Ledia menangkap kesulitan tersebut sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda tetapi semakin terasa berat di masa pandemi ini berlangsung.

"Persoalan SPP misalnya, yang menjadi andalan bagi sekolah swasta untuk membiayai kebutuhan operasionalnya kini banyak terkoreksi karena orangtua banyak yang tidak mampu membayar. Pada akhirnya hal ini juga berujung pada persoalan kesejahteraan guru dan pegawai di lingkup lembaga pendidikan swasta yang ikut terkoreksi", papar Ledia.

Adanya relaksasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang memungkinkan penggunaan untuk gaji guru honor sampai lebih dari 50% nyatanya belum memadai.

"Masih banyak sekolah yang lebih dari 75% gurnya adalah guru Non PNS atau yang biasa kita sebut sebagai guru



honor. Bahkan di seluruh Indonesia banyak sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS, yaitu Kepala Sekolah. Dana BOS yang ada bila digunakan untuk menutup biaya operasional sekolah plus honor guru dan tenaga kependidikan lain tentu menjadi kurang memadai." lanjut alegg asal Fraksi PKS ini.

Masih terkait dana BOS, ukuran jumlah yang diterima setiap sekolah tergantung pada jumlah murid. Padahal mayoritas sekolah swasta justru tengah menghadapi persoalan kekurangan murid.

"Saya bertemu dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Cimahi, lalu bertemu kepala sekolah dan guru-guru dari beberapa sekolah swasta di Kota Bandung, semua mengeluhkan hal yang sama, sedang mengalami persoalan kekurangan murid. Dan diantaranya menurut aduan mereka karena ada kebijakan pembukaan sekolah negeri yang tidak sesuai peraturan." Ungkap Sekretaris Fraksi PKS ini pula.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Fikri Faqih Usulkan Miliaran Anggaran POP Dialihkan Untuk Hotspot Internet Gratis

“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (06/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyatakan program organisasi penggerak (POP) senilai setengah triliun lebih atau tepatnya, Rp. 595 miliar diusulkan dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa.

“Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Fikri di sela kegiatan reses, Kamis (06/08).

Politisi Partai Keadilan

Sejahtera ini mengungkapkan program organisasi penggerak (POP) yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan.

Sebut saja organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program.

“Protes ini kami tampung dan dianggap mengusik rasa keadilan oleh banyak elemen masyarakat tersebut, minimal ada pelanggaran etis yang terjadi dalam prosesnya,” ujar Fikri.

Karenanya, ia mendesak agar program organisasi penggerak ini ditarik dari pelaksanaannya, “Minimal ditunda dulu dalam rangka kaji ulang,” usulnya.

Ia juga mengusulkan agar daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) khusus POP direvisi menjadi program lain.

“Usulan saya adalah mengadakan hotspot-hotspot internet gratis yang tersebar di tiap RW, minimal kantor desa/kelurahan, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa yang berjumlah lebih dari 52,5 juta orang,” katanya.

Dia menambahkan, program ini disesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, yakni tetap dalam protokol kesehatan ketat.

“Pelaksanaannya bisa bergantian atau dijadwal sesuai jenjang sekolah siswa/mahasiswa di tiap titik hotspot,” ujarnya.

Disamping itu, pengadaan banyak titik hotspot bertujuan agar mengurangi konsentrasi massa yang berkumpul.



“Idealnya di tiap RW ada, atau displit lagi menjadi beberapa titik, misalnya tiap RT ada hotspot, hal ini bisa saja kombinasi antara dana pemerintah sebagai stimulus dengan swadaya masyarakat di lingkungan tersebut,” urai Fikri.

Fikri juga menjelaskan mengenai proses alih-mengalihkan anggaran yang menjadi hal lumrah di masa pandemi ini.

“Sudah biasa kok pemerintah naik-naikan anggaran

tanpa persetujuan DPR atas alasan darurat pandemi, tinggal acc Menteri keuangan saja,” cetusnya.

Dia menyorotkan soal DIPA yang sudah keluar sebelum proses pembahasan anggaran mitra dilakukan di DPR RI.

“Kita (DPR) menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran, jadi fungsi anggaran DPR akan tetap kami perjuangkan ata

## Pertumbuhan Negatif pada Kuartal II 2020

# Ecky: Indonesia di Ambang Resesi Ekonomi

“Pemerintah mencabut Batasan defisit anggaran dengan alasan membutuhkan fiscal space untuk stimulus, akan tetapi apabila rencana stimulus itu tidak dibelanjakan dikhawatirkan hanya akan menumpuk menjadi SiLPA di akhir tahun”

### H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (06/08) — BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka negatif 5,2 persen (yoy) atau negatif 4,9 persen (qoq).

Menurut anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam, rilis tersebut mengkonfirmasi Indonesia sudah di ambang pintu resesi ekonomi.

"Jika pada triwulan III 2020 pertumbuhan masih negatif, maka akan resmi masuk resesi dengan digenapinya rezim pertumbuhan negatif selama dua periode kuartal berturut-turut," ungkapnya.

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen.

Ecky menyatakan Peme-

rintah semestinya lebih mawas diri dengan realita pertumbuhan yang jauh lebih dalam terkontraksi dibanding proyeksi yang dikeluarkan Pemerintah sendiri dan Bank Indonesia yaitu pada kisaran antara 4,3 persen dan 4,8 persen.

Dalam rilis BPS disebutkan bahwa PDB atas dasar harga konstan pada triwulan II-2020 sebesar Rp2.589,6 triliun, turun senilai Rp145,7 triliun dari PDB periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan lapangan usaha, terdapat lima sektor yang mengalami pertumbuhan negatif mencapai dua digit, yaitu jasa keuangan -10,3 persen, jasa perusahaan -14,11 persen, jasa lainnya -15,12 persen, akomodasi & makan minum -22,31 persen, serta

transportasi dan perdagangan -29,22 persen.

“Sektor keuangan termasuk perbankan merupakan urat nadi perekonomian bagi suatu negara, dengan melihat fakta bahwa pertumbuhan di sektor ini terkontraksi sangat dalam sampai dengan -10,3 persen, menandakan adanya kegagalan pemerintah dalam merancang desain pemulihan ekonomi atau ketidakefektifan dari langkah yang telah dijalankan” ujar Ecky.

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan pengeluaran terkoreksi 4,19 persen (qtq), dimana dari enam jenis pengeluaran secara kuartalan hanya konsumsi Pemerintah yang berada di angka positif. Tercatat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat sebesar -6,51 persen (qtq), konsumsi LNPR 0,78 persen, konsumsi Pemerintah 22,32 persen, PMTB -9,71 persen, ekspor -12,81 persen, serta impor -14,16 persen.

Ecky menulurkan resesi ekonomi dilihat dari PDB pengeluaran, maka ekspor dan impor menjadi komponen yang paling signifikan terpengaruh.

“Kontraksi impor yang lebih dalam dibandingkan dengan ekspor membawa dampak adanya surplus neraca



perdagangan”, urainya.

Menurutnya ini merupakan hiburan sementara, karena mimpi buruk sebenarnya adalah penurunan impor, pada kasus bahan baku, membawa dampak terhambatnya pergerakan industri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perdagangan.

“Sedangkan impor bahan modal akan mempengaruhi komponen investasi yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi” kata Ecky.

Ecky mengkritisi kinerja Pemerintah yang justru menu-run di saat negara membutuhkan stimulus fiskal.

“Pada kuartal II-2020, konsumsi Pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar 6,9%, hal ini justru merugikan di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini”.

Ecky menambahkan realisasi belanja Pemerintah pusat hingga Juni 2020 hanya mencapai 33,8%, justru turun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 38,6%.

Menurut Ecky, saat siklus ekonomi sedang menurun, ekspansi fiskal mutlak diperlukan.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat

Sebaiknya lembaga pendidikan tinggi selalu mencoba dan menerapkan prototype teknologi terbaru, Learn by doing, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill, melakukan kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat

## Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Senin (10/08) — Dalam Webinar yang diadakan Universitas YARSI dan FOSSEI, Anis Byarwati Legislator dari Komisi XI menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global.

Menurut Anis, berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan lockdown

mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi.

"Jika pada triwulan III 2020 pertumbuhan masih negatif, maka akan resmi masuk resesi dengan digenapinya rezim pertumbuhan negatif selama dua periode kuartal berturut-turut," tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Anis menambahkan, pandemi berimbas pada nasib jutaan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

"Berdasarkan data

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 27 Mei 2020, sebanyak 3.066.567 pekerja terdampak Covid-19 di-PHK maupun dirumahkan.

Sedangkan menurut catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga Juli 2020 ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang di-PHK ataupun dirumahkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020 penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi tiga lapangan kerja, yakni pertanian sebesar 29,04%, perdagangan sebesar 18,63%, dan industri pengolahan sebesar 14,09%. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase, jika dibandingkan dengan Februari 2019, yakni jasa pendidikan meningkat 0,24%, konstruksi meningkat 0,19%, dan jasa kesehatan meningkat 0,13%", paparnya.

Anis juga memberikan harapan khususnya kepada peserta Webinar dari berbagai



universitas di Indonesia ini, bahwa peluang bekerja di bidang penjualan dan pemasaran (sales and marketing) paling besar, mencapai 50,5%.

"Rinciannya, sebanyak 0,35% internship, 32,49% entry level, 65,14% associate, 1,98% mid senior dan 0,07% director. Peluang lowongan pekerjaan di bidang IT dan software mencapai 13,4%, dengan rincian 2,92% internship, 37,92% entry level, 39,01% associate, 19,82% mid senior, dan 0,33% director. Posisi berikutnya bidang pelayanan umum (general services) sebesar 11,5%, dengan rincian 32,44% internship, 66,56% entry level, 0,78% associate,

0,19% mid senior, dan 0,03% director," terang Anis.

Secara keseluruhan, lanjutnya, lowongan kerja yang dibuka untuk lulusan baru mencapai 54,2%. Posisi program officer development paling banyak dicari calon pekerja. Diikuti account officer, business analyst, social media officer, dan banking officer.

Anis yang juga seorang dosen Pasca Sarjana Universitas Yarsi ini memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan tinggi untuk komitmen dalam peningkatan investasi di pengembangan digital skills.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kalian semua adalah generasi pemimpin bangsa, tetap kuat menghadapi dan menjawab berbagai tantangan di masa pandemi covid 19 dan setelahnya, gunakan value yang kalian miliki. Berani Sukses, berani menerima tantangan”**

Pesan ini disampaikan  
Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.  
kepada para peserta Webinar  
dari berbagai universitas  
di Indonesia



## Soal RUU Cipta Kerja

# Wakil Ketua Fraksi PKS: Musuh Utama Investasi adalah Korupsi

Pemerintah harus cermat mengidentifikasi akar masalah pengembangan investasi nasional. Masalahnya bukan pada regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional tapi budaya korupsi yang merebak dalam birokrasi. Bank Dunia juga menyatakan demikian

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (11/08) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Bukan soal ketenagakerjaan atau desentralisasi perijinan yang ada di daerah.

Karena itu, tegas Mulyanto, solusi yang harus diambil Pemerintah adalah

meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.

"Bukan sekedar melalui pendekatan menerbitkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang justru melemahkan jaminan sosial tenaga kerja serta kembali mendorong sistem yang sentralistik", tandasnya.

Mulyanto berpendapat pasal-pasal dalam RUU

Omnibus Law Ciptaker berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan ketimpangan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

"Pemerintah harus cermat mengidentifikasi akar masalah pengembangan investasi nasional. Masalahnya bukan pada regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional tapi budaya korupsi yang merebak dalam birokrasi. Bank Dunia juga menyatakan demikian," jelas Mulyanto.

Sebelumnya Bank Dunia dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli 2020 dengan judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery, menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia. Secara umum, Bank Dunia berpendapat kegiatan usaha



yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan.

Penilaian yang sama juga disampaikan World Economic Forum (WEF). Secara regular, WEF melaksanakan survei opini para eksekutif dalam pertemuan tahunan mereka, yang meminta para eksekutif untuk memilih dan mengurutkan 5 dari 16 faktor yang paling menghambat investasi bisnis di Negara mereka.

Hasilnya, dalam GCR (Global Competitive Report)

tahun 2018, WEF melaporkan faktor utama yang paling menghambat investasi bisnis di masing-masing negara. Untuk kasus Indonesia, faktor utamanya adalah korupsi. Baru setelah itu faktor birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

"Di Thailand faktor korupsi berada di urutan kelima. Di Malaysia menjadi faktor di urutan keenam. Sedang di Singapura, korupsi adalah faktor penghambat bisnis di urutan ke-16," tegas anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Program Ibu Berdaya

Program Paguyuban Ibu Berdaya dibentuk pada tanggal 22 Januari 2020. program ini diinisiasi oleh Yayasan Mandiri Berkah Berdaya.

Saat ini, program Paguyuban Ibu Berdaya sudah memiliki 188 anggota aktif yang tergabung dalam 10 himpunan, dan tersebar di Kecamatan Kebonpedes dan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.

Pinjaman tersalur sudah mencapai Rp 69.500.000, dengan tingkat pengembalian 100 persen. Tujuan program ini untuk pemberantasan rentenir dan edukasi keuangan keluarga melalui program koperasi berbasis syariah di lingkungan masyarakat Sukabumi

## drh. H. Slamet

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Jabar IV

"Target peserta program ini adalah ibu rumah tangga pra-sejahtera di wilayah Sukabumi. Keunggulan program Paguyuban Ibu Berdaya diantaranya, 100 persen syariah, dengan akad qordhul hasan atau tanpa bunga. Lebih solid, sistem tanggung renteng membuat kelompok lebih solid dan bertanggungjawab satu sama lain



## Reses di Kebonpedes Sukabumi

# Slamet Bicara Soal Program Ibu Berdaya

Dari data yang berhasil kami himpun, bahwa sebagian besar pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan konsumsi, keperluan anak, dan kesehatan. Dari kondisi seperti inilah Yayasan Mandiri Berkah Berdaya menginisiasi program Paguyuban Ibu Berdaya

### drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (09/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, kembali menegaskan pentingnya program Ibu Berdaya untuk membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir.

Slamet mengatakan, realitas masih banyaknya masyarakat yang terjatuh oleh aktivitas rentenir dikhawatirkan akan merusak tatanan sosial masyarakat di Sukabumi.

"Terlebih sifat kekeluargaan dan gotong royong sesama warga mulai berkurang. Fakta yang sangat

mengejutkan selanjutnya adalah banyak rentenir di Sukabumi yang beroperasi dengan berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Tentu hal ini menjadi catatan buruk di tengah mati surinya ekonomi kerakyatan bermodel koperasi ini," kata Slamet saat melaksanakan reses di wilayah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Sabtu (08/08/2020).

Slamet mengungkapkan, mayoritas korban rentenir merupakan masyarakat kalangan bawah yang memiliki

penghasilan rendah. Sebab, sambung Slamet, masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut tidak memiliki akses ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman.

"Dari data yang berhasil kami himpun, bahwa sebagian besar pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan konsumsi, keperluan anak, dan kesehatan. Dari kondisi seperti inilah Yayasan Mandiri Berkah Berdaya menginisiasi program Paguyuban Ibu Berdaya," jelas Slamet.

Slamet menuturkan, program Paguyuban Ibu Berdaya dibentuk pada tanggal 22 Januari 2020. Saat ini, program Paguyuban Ibu Berdaya sudah memiliki 188 anggota aktif yang tergabung dalam 10 himpunan, dan tersebar di Kecamatan Kebonpedes dan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.

"Pinjaman tersalur sudah mencapai Rp 69.500.000, dengan tingkat pengembalian 100 persen. Tujuan program ini untuk pemerantasan rentenir



dan edukasi keuangan keluarga melalui program koperasi berbasis syariah di lingkungan masyarakat Sukabumi," tutur Slamet.

"Target peserta program ini adalah ibu rumah tangga pra-sejahtera di wilayah Sukabumi. Keunggulan program Paguyuban Ibu Berdaya diantaranya, 100 persen syari'ah, dengan akad qordhul hasan atau tanpa bunga. Lebih

solid, sistem tanggung renteng membuat kelompok lebih solid dan bertanggungjawab satu sama lain. 100 persen pengembalian, di mana dari pinjaman yang sudah berjalan tingkat pengembalian lancar. Dan mentoring, yakni setiap peserta mendapatkan pembinaan keislaman di setiap pertemuan pekanan," tukas Slamet.

# Anggota FPKS Siap Bantu Pelaku Budidaya Ikan di Kabupaten Sumbawa Barat

"Insya Allah saya mendukung program budidaya Nila Merah di KSB. Tinggal Pak bupati siapkan lahannya, saya yang *support* bibitnya, Mari kita ciptakan ketahanan keluarga dengan mengkonsumsi ikan. Mari kita hidupkan UMKM lokal kita agar mereka lebih berdaya,"

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (07/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan membagikan 500 paket ikan segar di Kabupaten Sumbawa Barat.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang cukup sulit, Politisi PKS ini membantu warga masyarakat yang terdampak, agar tetap menjaga terpenuhinya asupan gizi.

Johan memberikan bantuan 500 paket ikan segar kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di daerah tersebut.

Pembagian paket ikan segar dari Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I Pulau Sumbawa ini, bagian dari kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan tema, Makan Ikan, Sehat Kuat, Cerdas yang digelar bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman Bupati Sumbawa Barat H.W. Musyafirin, Selasa (04/08/2020).

Satu paket masing-masing berisikan sejumlah jenis maku-

nan berbahan dasar ikan. Dan masker ayo lawan Covid-19.

Penyerahan bantuan paket ikan oleh Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa dilakukan secara simbolis kepada lima orang penerima, disaksikan Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Machmud dan ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharudin Umar.

Johan mengatakan, kegiatan Safari Gemarikan ini, tidak dilaksanakan di semua daerah. Hanya 54 titik di seluruh Indonesia. Sesuai jumlah anggota komisi IV DPR RI. Salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Karena itu Politisi PKS asal Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ini, mengajak warga KSB, menciptakan ketahanan keluarga dengan meningkatkan konsumsi ikan. Sehingga dengan semakin meningkatnya konsumsi ikan, para nelayan



tidak sulit mencari pasar menjual hasil tangkapannya. Selain itu juga, dengan adanya ketersediaan pasar yang jelas, akan muncul pembudidayaan ikan air tawar lokal KSB.

Tuntuk membudidaya ikan air tawar maupun sejenisnya, dia berjanji siap memfasilitasi pembudidayaan dengan sarana dan prasarana penunjang. Seperti bibit. Asalkan ketanya, lahan atau lokasinya jelas. Minimal ke depan, kebutuhan pasar KSB, dapat terpenuhi dari produksi lokal KSB.

Bahkan mantan anggota DPRD Provinsi NTB tiga priode ini, menyambut baik keinginan bupati Sumbawa barat, memasyarakatkan membudidaya ikan Nila Merah.

"Insya Allah saya mendukung program budidaya Nila

Merah di KSB. Tinggal Pak bupati siapkan lahannya, saya yang *support* bibitnya," janjinya di hadapan para tamu undangan.

"Mari kita ciptakan ketahanan keluarga dengan mengkonsumsi ikan. Mari kita hidupkan UMKM lokal kita agar mereka lebih berdaya," tambahnya lagi.

Sebelumnya Bupati Sumbawa Barat Musyafirin menyampaikan, makan ikan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat KSB. Kebiasaan ini merupakan modal besar bagi masyarakat menuksekkan Gemarikan. Namun di sisi lain mendorong untuk berusaha. Usaha yang paling menjanjikan di mana pun, adalah kuliner.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Saat Reses, Syahrul Aidi Tunjukkan Abrasi Terparah di Inhu-Kuansing

Dari kunjungan ini kita dapat membuat peta skala prioritas. Jangan sampai abrasi sungai di Indragiri dan Kuantan sebagai DAS Indragiri tidak sampai merusak sarana dan prasaranan pemerintah dan masyarakat

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Indragiri Hulu (08/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maaizat mengajak Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) III Kementerian PUPR untuk berkeliling Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Kuantan Singingi (Kuansing) dalam rangka meninjau kondisi sungai indragiri dan kuantan yang dikabarkans mengalami abrasi parah dalam beberapa tahun ini.

Kunjungan kerja selama dua hari yaitu pada Jumat (7/8/2020), dengan agenda utama kunjungan ini adalah meninjau lokasi abrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri.

Dalam kunjungan ini, Syahrul Aidi didampingi oleh Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu fraksi PKS, yaitu Muhammad Syafaat, Rizal Zamzami,

Mulyanto dan Ninik Mulyani.

Adapun lokasi yang mereka kunjungi yaitu Sungai Indragiri Desa Pulau Gelang Kec. Kuala Cenaku, Sungai Indragiri Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat, Sungai Indragiri Desa Lembah Dusun Gading Kec. Pasir Penyu, Sungai Indragiri Desa Silunak Kec. Batang Peranap, Sungai Indragiri Kelurahan Batu Rijal Hilir Kec. Peranap, Batang Kuantan Desa Kampung Baru Timur Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi.

Kepala BWSS III, Syahril menyampaikan bahwa dari beberapa lokasi yang mereka tinjau perlu ditangani segera.

"Ada beberapa lokasi yang sangat perlu untuk ditangani sesegera mungkin. Kalau perlu tahun ini dapat dibuatkan DED-nya dan tahun depan dapat dilaksanakan pembangunan-

nya." terang Syahrul.

Sementara Syahrul Aidi menyampaikan bahwa dari kunjungan kali ini dia dapat memetakan skala prioritas usulan pembangunan berdasarkan kondisi di lapangan.

"Dari kunjungan ini kita dapat membuat peta skala prioritas. Jangan sampai abrasi sungai di Indragiri dan Kuantan sebagai DAS Indragiri tidak sampai merusak sarana dan prasaranan pemerintah dan masyarakat. Tahun ini kita upayakan memasukkan DED-nya dan kita perjuangkan anggaran untuk pembangunan tahun 2021." terang Syahrul Aidi.

Dia juga akan melaporkan hasil kunjungan kerja ini dalam rapat di Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR tentang kondisi abrasi di Provinsi Riau.



## Masa Reses

# Hermanto Serahkan Mesin Panen Besar kepada Petani

Saya berharap dari hasil mengelola mesin panen ini Langir Jaya bisa membeli berbagai alat pertanian modern lainnya. Dengan berbagai alat modern yang dimiliki tersebut, kelak Langir Jaya bisa mandiri dan memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya

## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (07/08) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan mengadakan pertemuan dengan para petani dilanjutkan penyerahan mesin panen (combine harvester) besar bantuan Pemerintah kepada Kelompok Tani Langir Jaya di Kabupaten Sijunjung. Pertemuan dan penyerahan mesin panen dilakukan di lokasi petani di Jorong Bunga Tanjung, Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. "Mesin panen ini milik negara yang dipercayakan pengelolaannya kepada kelompok

tani Langir Jaya. Karena itu pakailah, periharalah dan rawat dengan baik", ujar Hermanto.

Menurutnya, mesin panen ini bila dikelola dengan baik bisa mendatangkan penghasilan yang besar bagi kelompok.

"Saya berharap dari hasil mengelola mesin panen ini Langir Jaya bisa membeli berbagai alat pertanian modern lainnya. Dengan berbagai alat modern yang dimiliki tersebut, kelak Langir Jaya bisa mandiri dan memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya," papar legislator FPKS ini.

Kemajuan dan

kesejahteraan petani, lanjutnya, ditentukan oleh petani yang bersangkutan.

"Negara hanya membantu memberikan pancingan. Sebesar dan sebanyak apapun bantuan negara, kalau petani tidak punya tekad untuk maju dan sejahtera, maka bantuan negara tersebut akan kurang bermanfaat bahkan bisa mubazir," tuturnya.

Sebaliknya, lanjut Hermanto, bila petani punya tekad, semangat dan kompak untuk maju maka lambat laun akan maju dan sejahtera baik dengan maupun tanpa bantuan negara atau pihak lain.

"Tanda petani maju adalah mandiri, tidak tergantung pada bantuan pihak lain", ucapnya.

"Mandiri jangan diartikan menutup diri dari bantuan pihak lain. Bantuan pihak lain dikelola sebaik mungkin guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan", pungkas legislator dari Komisi IV DPR ini mengakhiri.



## Reses Anggota DPR RI

# Saadiah Kunjungi Sinode GPM Maluku

Semua unsur stakeholder ingin kita dengar. Kita ingin membangun format dan perspektif yang sama untuk perjuangan kepentingan Maluku di pusat

### SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Ambon (07/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan ke Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM).

Kunjungan Saadiah dalam rangka Reses masa sidang ke empat tahun 2020 tersebut diterima langsung Ketua Sinode GPM, A.J.S. Werinussa, Ketua Angkatan Muda GPM, Max Takaria beserta jajaran Sinode GPM. Sementara Saadiah didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala.

"Semua unsur stakeholder ingin kita dengar. Kita ingin membangun format dan perspektif yang sama untuk perjuangan kepentingan Maluku di pusat," kata Saadiah di hadapan Functionaris GPM, Kamis (06/08/2020).

Saadiah melanjutkan, GPM sebagai stakeholder yang memiliki basis keagamaan, memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa dan negara.

"GPM punya posisi strategis dalam pembangunan. Semoga ada sinergitas dalam mencari solusi bagi persoalan-persoalan daerah dan Indonesia," tegasnya.

Selain itu, Maluku yang dikenal sebagai salah satu laboratorium keberagaman di Indonesia, kata Saadiah harus tetap dijaga bersama.

Menurutnya, GPM dan tokoh-tokoh agama memiliki peran menjaga kondisi Maluku yang damai dan rukun.

"Kita juga sudah ke Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Kita ingin GPM beser-

ta semua Ormas keagamaan punya perspektif yang sama untuk menjaga Maluku sebagai Provinsi Orang Basudara," kata Saadiah.

Sementara itu, Ketua Sinode GPM, Pdt. A.J.S. Werinussa menyambut baik kunjungan legislator Maluku dari PKS tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Saadiah dan Pak Asis. Kita minta agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan kepentingan Maluku di Pusat," kata Werinussa.

Dia juga mengatakan, GPM selain dalam tugas keagamaan, juga memiliki peran untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Peran gereja selain mendorong keimanan umat, juga berperan dalam mendorong kesejahteraan," pungkasnya.

Selain Ketua Sinode GPM, Ketua Angkatan Muda GPM, Max Takaria dalam kesempatan itu juga menyampaikan seputar Covid-19 khususnya terkait dampak ekonominya bagi masyarakat.

"Di GPM saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Bencana.



Kami sudah mendata beberapa warga jemaat yang kena dampak covid-19. Ada yang di PHK dari tempat kerjanya," ungkapnya.

Dirinya, meminta agar PKS bisa mengadvokasi masyarakat yang hilang pekerjaannya dengan program kartu prakerja.

Menanggapi hal itu, Wakil

Ketua DPRD asal PKS, Asis Sangkala menegaskan akan membantu lewat lembaga DPRD sesuai permintaan ketua AM GPM.

"Kita akan bantu. Kebetulan saya di bagian jaring pengaman sosial tim covid-19 DPRD Provinsi Maluku," kata Asis.

## Bersama BUMN

# Rafli Rehab Rumah Duafa

Dengan kegiatan rehab rumah ini, kita berharap masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu dan memiliki rumah layak huni”

## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Aceh Selatan (11/08) — Anggota DPR RI Dapil I Rafli bersama dengan Perusahaan plat merah, PLN Wilayah Aceh merehab Rumah Masyarakat Kurang Mampu.

Rumah yang akan direhab terdata berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah sebanyak 4 unit Rumah.

Sebelumnya, Lemka Foundation yang merupakan mitra anggota DPR RI FPKS itu, telah melakukan verifikasi sejumlah rumah masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang akan direhab.

“Kami dari Lemka

Foundation sudah menverifikasi rumah - rumah yang akan di rehab. Sasaran penerima bantuan rehab rumah ini merupakan masyarakat dengan ekonomi kurang mampu, saat ini sudah kita data 4 unit rumah” ucap Aminullah, Pembina Lemka Foundation, Selasa (11/08)

Aminullah menambahkan saat ini proses rehab rumah sedang berlangsung dengan target pengerjaannya selesai dalam beberapa minggu kedepan

Program Rehab Rumah Duafa merupakan kerjasama antara Anggota DPR RI Rafli dan PT. PLN Wilayah Aceh melalui CSR yang dilaksanakan oleh Lemka Foundation.

Melalui Lemka Fondation, Rafli berharap kegiatan rehab rumah duafa tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki rumah layak huni

“Dengan kegiatan rehab rumah ini, kita berharap masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu dan memiliki rumah layak huni” Ucap Rafli



## Peringati Idul Adha

# Bukhori Yusuf Salurkan Hewan Kurban di Dapil

“Daging-daging kurban ini kami antarkan langsung ke rumah-rumah warga setelah kami lakukan pendataan. Pembagian secara langsung ini dilakukan untuk menghindari kerumunan sehingga sesuai dengan protokol kesehatan. Melalui bantuan pangan ini, kami berharap bisa membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga sekaligus meringankan beban mereka akibat Covid-19”

### KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



**BERKURBAN  
BERBAGI DAN  
TERUS MELAYANI**

SELAMAT IDUL ADHA 1441 H

Semarang (08/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyelenggarakan pembagian daging kurban kepada masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Kegiatan pembagian daging kurban tersebut diseleng-

garakan dalam rangka merayakan Idul Adha bersama warga di konstituen sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan reses di dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal) pada masa sidang ke-IV.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi VIII ini menyumbang sejumlah hewan kurban yang terdiri dari sapi sebanyak 4 ekor dan kambing

sebanyak 5 ekor. Selain itu, agenda ini juga berhasil terselenggara atas kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Bukhori menuturkan, pembagian daging tersebut diprioritaskan kepada sejumlah warga prasejahtera di dapil.

Program pembagian daging tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka kecukupan nutrisi yang dibutuhkan warga serta meringankan beban ekonomi mereka akibat dampak pandemi.

“Daging-daging kurban ini kami antarkan langsung ke rumah-rumah warga setelah kami lakukan pendataan. Pembagian secara langsung ini dilakukan untuk menghindari kerumunan sehingga sesuai dengan protokol kesehatan. Melalui bantuan pangan ini, kami berharap bisa membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga sekaligus meringankan beban mereka akibat Covid-19” tutur Bukhori, Sabtu, (01/08/2020).

Anggota Baleg ini menjelaskan, pemotongan dan distribusi daging turut melibatkan



masyarakat di masing-masing kota/kabupaten di dapil. Pelibatan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan serta memelihara solidaritas sosial di tengah masyarakat dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi.

“Idul adha adalah momentum untuk saling menguatkan persaudaraan antar sesama. Yang kuat menolong yang lemah, yang berlebih memberi kepada yang kekurangan,

dimana setiap insan berlomba untuk saling melakukan pengorbanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga, melalui kesadaran sosial yang dibangun atas keimanan ini, kita juga mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong dan tenggang rasa terhadap saudara sebangsa setanah air” pungkasnya.

RUU Cipta Kerja

# Runtuhkan Falsafah Pendidikan Bangsa

Anggota Komisi X DPR RI

**Fahmy Alaydroes**

"Pendidikan kini mau disempitkan sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja. Padahal pendidikan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat luhur. Tugas pendidikan adalah memanusiakan manusia, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul.

**HARI ASPIRASI**

FRAKSI PKS DPR RI



Sekjen Asahpena

**Lovely B**

"RUU Cipta Kerja itu memaksa kami untuk mengurus perizinan secara terpusat. Tentu ini lebih repot karena di tingkat kabupaten/kota saja, izin kami sulit karena pelayanan perizinan satu pintu mensyaratkan kehadiran fisik, berupa bangunan dan sebagainya. Padahal kegiatan belajar mengajar kadang kami lakukan di tempat-tempat seperti kolong jembatan, karena murid kami banyak yang berasal dari kalangan marjinal"

Anggota Komisi X DPR RI

**Ledia Hanifa**

"RUU ini akan menyusahkan banyak pihak. Sekarang saja, dengan pendidikan yang sifatnya nir laba, sudah banyak masalah yang ditimbulkan. Apalagi jika frase itu dihapuskan"

# RUU Ciptaker Buka Keran Komersialisasi Pendidikan

“Pemerintah terlalu fokus pada sekolah formal karena dianggap beririsan dengan investasi, sehingga melupakan pentingnya pendidikan non formal terutama homeschooling. Padahal saat pandemi kemarin, homeschooling ini menjadi alternatif. Tapi karena konsepnya tidak diperhatikan, eksekusinya jadi bermasalah”

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (7/8) - Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa menuturkan bahwa RUU Cipta Kerja menghapuskan frase penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba di dalam salah satu pasalnya. Hal ini menurutnya akan membuka jalan untuk komersialisasi pendidikan.

“RUU ini akan menyusahkan banyak pihak. Sekarang saja, dengan pendidikan yang sifatnya nirlaba, sudah banyak masalah yang ditimbulkan. Apalagi jika frase itu dihapuskan” ujar Ledia saat menerima aspirasi dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asahpena),

Jumat (07/08/2020).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut, banyak siswa-siswi miskin yang sulit bersekolah jika pendidikan tidak lagi bersifat nirlaba seperti yang dimaksud RUU Cipta Kerja tersebut. Belum lagi, Praktik Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dapat diambil alih oleh perusahaan yang tentu berorientasi bisnis dan laba. “Berapa banyak siswa-siswi tak mampu yang tidak dapat bersekolah kalau hal ini terjadi?” ujar Ledia Hanifa.

Ledia juga menyesalkan RUU Cipta Kerja yang terkesan meminggirkan pendidikan non

formal seperti homeschooling. Padahal, pendidikan ini menjadi alternatif saat terjadinya pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan belajar-mengajar diselenggarakan di rumah.

“Pemerintah terlalu fokus pada sekolah formal karena dianggap beririsan dengan investasi, sehingga melupakan pentingnya pendidikan non formal terutama homeschooling. Padahal saat pandemi kemarin, homeschooling ini menjadi alternatif. Tapi karena konsepnya tidak diperhatikan, eksekusinya jadi bermasalah” kata Ledia Hanifa.

Ledia juga menyayangkan revisi UU Sisdiknas dimasukkan ke RUU Cipta Kerja. Menurut Ledia, ini sama sekali tidak relevan. Karena itu, Fraksi PKS akan melobi fraksi-fraksi lain di DPR untuk mencegah pasal-pasal bermasalah terkait pendidikan masuk di dalam RUU Cipta Kerja.

“Kami yakin rekan-rekan kami di DPR masih punya hati nurani dan mampu berpikir jernih” ujar Ledia Hanifa.

Sementara itu, Sekjend Asahpena Lovely B menyampaikan dua aspirasi kepada Fraksi PKS. Asahpena meminta



agar PKS mencegah upaya memasukkan revisi UU Sisdiknas ke RUU Cipta Kerja. Mereka juga meminta agar perizinan sekolah non formal dipermudah dalam RUU Cipta Kerja. Menurut Lovely, adanya pengurusan perizinan terpusat akan membebani mereka.

“RUU Cipta Kerja itu memaksa kami untuk mengurus perizinan secara terpusat. Tentu

ini lebih repot karena di tingkat kabupaten/kota saja, izin kami sulit karena pelayanan perizinan satu pintu mensyaratkan kehadiran fisik, berupa bangunan dan sebagainya. Padahal kegiatan belajar mengajar kadang kami lakukan di tempat-tempat seperti kolong jembatan, karena murid kami banyak yang berasal dari kalangan marjinal” ujar Lovely.

# RUU Ciptaker Runtuhkan Falsafah Pendidikan Bangsa

“Pendidikan kini mau disempitkan sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja. Padahal pendidikan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat luhur. Tugas pendidikan adalah memanusiasi manusia, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul.

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (7/8) - Anggota Fraksi PKS DPR RI Fahmy Alaydroes menyatakan bahwa RUU Ciptaker dapat meruntuhkan fondasi dan falsafah pendidikan bangsa. Fahmy juga menyorot falsafah pendidikan yang akan berubah jika RUU Ciptaker disahkan. Salah satunya orientasi pendidikan yang berupaya menghasilkan tenaga kerja.

“Pendidikan kini mau disempitkan sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja. “ujar Fahmy saat menerima aspirasi dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asahpena), Jumat (07/08/2020).

Padahal, menurut Fahmy, pendidikan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat luhur. Tugas pendidikan adalah memanusiasi manusia, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul.

Hampir semua ormas-ormas besar yang ada sebelum Indonesia merdeka, seperti NU, Muhammadiyah, dan Jamiatul Kheir, semuanya bergerak dibidang pendidikan. Mereka berupaya menyelenggarakan pendidikan yang dirumuskan dengan Pancasila, bukan atas pertimbangan bisnis/ekonomi.

Selain itu, RUU ini bisa berbahaya karena adanya pasal

yang menghapus sanksi untuk pembuat ijazah/gelar palsu.

“Menurut saya, ini tega. Kenapa harus dihapus pasal seperti ini? Pemerintah seolah-olah abai dengan praktik ijazah palsu dalam pendidikan kita” ujar Fahmy

Selain itu, pemerintah juga dianggap terlalu memudahkan izin kepada lembaga pendidikan asing. “Lembaga pendidikan asing kini bisa masuk dengan izin yang mudah” ujar Fahmy.

Oleh karena itu, menurut Fahmy, RUU Cipta Kerja ini harus terus dikawal.

“Pendidikan kita mau dibawa kemana jika RUU ini lolos?” tanya Fahmy.





الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah  
Wakil Ketua Umum PPP

# Dr. Hj. Reni Marlinawati

Wafat Pada Jum'at 7 Agustus 2020  
pukul 14.30 WIB di RSCM Jakarta

Semoga Allah SWT menerima amal  
ibadahnya serta Mengampuni  
segala Dosanya Amin



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



# HNW: Sidang Tahunan MPR, Buktikan Pemimpin Menjadi Teladan dengan Taati Aturan

Dan konsistensi MPR melaksanakan sidang tahunan dalam kondisi apapun, dengan tetap memperhatikan aspirasi Rakyat, akan meningkatkan kredibilitasnya di depan masyarakat

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

*Wakil Ketua MPR RI*

Jakarta (08/08) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, pelaksanaan sidang tahunan pada tanggal 14 Agustus 2020 akan menghardikan keteladanan Pemimpin Negara melaksanakan peraturan, dan bila demikian maka hal tersebut akan meningkatkan kredibilitas MPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.

Pasalnya menurut pria yang akrab disapa HNW ini, meski pandemi corona tak kunjung reda, MPR tetap melaksanakan amanat Peraturan Tata Tertib MPR untuk menggelar sidang sekali dalam setahun. Tentu dengan tetap merujuk kepada aturan protokol covid-19.

"Dan konsistensi MPR melaksanakan sidang tahunan dalam kondisi apapun, dengan

tetap memperhatikan aspirasi Rakyat, akan meningkatkan kredibilitasnya di depan masyarakat," terang Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Karenanya, sebagai salah satu lembaga pembuat aturan, lanjut HNW, MPR konsisten menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri.

Karena memang, kata HNW, seharusnya Lembaga Negara dan para Pemimpin menjadi teladan melaksanakan aturan, agar masyarakat dapat diminta untuk melaksanakan seluruh undang-undang dan aturan-aturan yang ada dalam Negara.

"Bagaimana mungkin MPR dan Pimpinan Negara bisa mengajak masyarakat selalu patuh dan taat menjalankan Undang-undang dan peraturan

lainnya, termasuk terkait covid-19, jika MPR dan Pimpinan Negara saja tidak melaksanakan aturan dalam Peraturan Tata Tertibnya sendiri. Dan bila ketaatan terhadap aturan seperti itu selalu dilaksanakan, akan membuat MPR dan Pimpinan Negara dipercaya serta kredibel di mata masyarakat". kata Hidayat menambahkan.

Pernyataan itu, disampaikan Hidayat secara virtual, saat menjadi pembicara pada acara Media Expert Meeting, yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, Jumat (07/08/2020).

Pertemuan dengan media cetak, online, radio serta televisi tersebut mengentengahkan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara.

Hidayat menampik anggapan, bahwa Sidang Tahunan hanya acara rutinitas dan menjaga konvensi belaka.

"Buktinya, Pimpinan MPR sudah memutuskan untuk hadirkan Rapat Tahunan yang berbeda dengan periode sebelumnya, yang lebih mendekati aspirasi rakyat. Drencanakan mulai tahun 2020, semua Ketua Lembaga Negara akan



langsung menyampaikan laporan kerjanya kepada masyarakat, dalam waktu yang cukup, tidak lagi diwakilkan kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Tetapi karena terjadinya pandemi covid-19, dan darurat kesehatan nasional, maka rencana itu belum bisa dilaksanakan pada Rapat Tahunan pada tahun ini," papar HNW.

Sekalipun demikian, katanya, agar Rapat Tahunan kali ini, tidak menambah skeptisnya Rakyat, maka diharapkan agar laporan Lembaga Negara, termasuk dari Presiden tidak berisikan 'angin surga', tapi

tidak juga berisikan akumulasi keluh kesah dan amarah.

"Kita mengharapkan agar Rapat Tahunan berisikan laporan kejujuran akan kinerja, yang akan bisa menghadirkan kepercayaan Rakyat, dan menyemangati seluruh warga Bangsa untuk berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bisa mengalahkan pesimisme akibat covid-19 serta menyelamatkan eksistensi Bangsa dan Negara dari darurat kesehatan covid-19", terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



INDONESIA  
MAJU

DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA

17 Agustus 2020

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



BHINNEKA TUNGGAL IKA

Bersama  
Kita Wujudkan  
Indonesia  
Lebih Baik



# Fraksi PKS DPR RI Gelar Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno



Jakarta (07/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Lomba Membaca Teks Proklamasi Kemerdekaan Mirip Suara Bung Karno, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Jumat, (07/08).

Dalam sambutannya saat Launching, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyampaikan untuk yang kesekian kalinya Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Lomba ini, dalam rangka : Pertama, sebagai bentuk tanggungjawab konstitusional kami Fraksi PKS DPR RI sekaligus merupakan tanggungjawab moral untuk terus mengokohkan nilai-nilai kebangsaan bagi putra-putri Indonesia dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

“Fraksi PKS menginginkan seluruh anak bangsa memahami tentang sejarah perjalanan

berdirinya bangsa ini, bahkan jauh sebelum berdirinya bangsa ini seluruh anak bangsa harus memahami tentang perjuangan, pengorbanan dan seluruh tahapan perjalanan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Yang Kedua, lanjutnya, dengan lomba ini Fraksi PKS mengharapkan rakyat Indonesia, seluruh putra-putri Indonesia, memiliki pemahaman yang kokoh dan utuh tentang perjuangan para pendahulu dan pengorbanan mereka, sehingga kita bisa meneladani mereka.

“Ketika kita bisa meneladani para pendahulu kita, para pejuang bangsa, bukan lagi berpikir apa yang harus kita ambil dari negara ini tetapi apa yang harus kita korbankan untuk bangsa dan negara ini. Apa yang mampu kita kelola dari kekayaan negara ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” terang Anggota DPR Asal Banten ini.

Dan yang Ketiga, tambah-

nya, Lomba ini diharapkan bisa mengokohkan putra putri Indonesia untuk mematri nilai-nilai patriotisme sejara jujur. Bukan hanya meng-klaim tetapi mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negera ini cukup banyak persoalan, dengan semangat patriotisme yang kokoh dan tangguh, apapun tantangan yang dihadapi di depan kita akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semua akan terasa ringan ketika kita menghadapi persoalan bangsa dengan semangat patriotisme yang kokoh dan tangguh,” tandas Jazuli.

Meski Fraksi PKS memilih untuk menjadi oposisi, bukan berarti kami tidak mengambil peran. Fraksi PKS tetap ingin berbuat dan berkontribusi untuk melakukan check and balancing, dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita.

“PKS punya cita-cita mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Sejahtera.

“Fraksi PKS menginginkan seluruh anak bangsa memahami tentang sejarah perjalanan berdirinya bangsa ini, bahkan jauh sebelum berdirinya bangsa ini seluruh anak bangsa harus memahami tentang perjuangan, pengorbanan dan seluruh tahapan perjalanan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,”

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Mudah-mudahan dengan lomba ini, kami menginginkan makna yang kuat, pesan kebangsaan yang kokoh. Agar seluruh anak bangsa memahami sejarah yang utuh dan lengkap sehingga mampu meneladani para pejuang bangsa.” Urai Jazuli.

“Dengan Bismillahirrahman-nirrahim Lomba Membaca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung

Karno kami buka, semoga bisa berjalan lancar sehingga bisa menghasilkan nilai-nilai yang kita inginkan. Terimalah persembahan dari kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengokohkan nilai-nilai kebangsaan ini,” tutup Jazuli dalam sambutan.



## Sambut HUT RI

# Rofik Gelar Service Motor Gratis Bantu Masyarakat



Purbalingga (05/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, terus melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di daerah pemilihannya

Kali ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Rofik bersama dengan Fidloh Threeyati (istri) mengadakan acara service motor honda gratis, Selasa (04/08/2020).

“Pada hari ini, di bulan yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia, bulan Agustus 2020. Hari ini kita dapat mengadakan acara service motor gratis, sebagai salah satu perwujudan kita mengisi kemerdekaan HUT RI,” tutur Rofik.

Acara dengan tema Gebyar Semangat Kemerdekaan ini digelar di halaman rumah kediaman Rofik, di Perum Griya Perwira Asri Purbalingga.

“Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 75, kami

ingin mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban masyarakat, apalagi di kondisi pandemi seperti ini,” tutur Rofik dalam sambutannya.

Senada dengan yang dikatakan suaminya, Fidloh Threeyati memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya acara ini.

“Semoga acara yang kita berikan ini, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat menginspirasi bagi yang lainnya.” Kata Fidloh

Sebelumnya dalam acara service motor masal ini, para peserta diberikan diskon 50% biaya service, kemudian Rofik dan Fidloh memberikan subsidi 50% lagi, sehingga biaya service menjadi gratis.

“Selain mendapatkan diskon biaya service sebesar 50% dari bengkel motor honda, kami juga ikut memberikan subsidi 50%, sehingga biaya service menjadi gratis.” Tegas Rofik

Acara ini mendapat respon antusias dari masyarakat, panitia mengatakan sampai

dengan siang tadi (04/08) sudah 200 lebih pemilik motor honda melakukan konfirmasi, acara yang semula diadakan hanya 3 hari (Selasa-Kamis), harus diperpanjang lagi di hari Sabtu dan minggu.

Salah seorang peserta mengatakan sangat terbantu dengan adanya acara ini.

“Alhamdulillah saya bisa berada di acara ini, terus terang saya pribadi belum menservice motor saya, seharusnya bulan lalu harus service, tetapi karena ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak, terpaksa motor belum saya service. Saya terimakasih sekali dengan adanya acara yang diadakan oleh pak Rofik dan bu Fidloh, karena sangat membantu kami.” Tutur Bu Anisa

Selain memberikan service motor gratis, dalam acara ini juga disediakan aneka jajanan pasar dan doorprize untuk peserta.

“Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 75, kami ingin mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban masyarakat, apalagi di kondisi pandemi seperti ini

**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Komisi VII DPR RI



# LOMBA MEMBACA TEKS PROKLAMASI MIRIP SUARA BUNG KARNO

TOTAL HADIAH  
**12 JUTA**  
RUPIAH



Persembahkan  
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia  
Dalam Rangka  
Menyambut HUT  
Kemerdekaan RI Ke-75

## Syarat dan Ketentuan:

1. Lomba ini terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS. Lomba ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI.
2. Peserta diwajibkan untuk follow Instagram @fraksipksdprri, Twitter @FPKSDPRRI, Facebook Fan Page Fraksi PKS DPR RI.
3. Durasi video maksimal 3 menit.
4. Video dapat didaftarkan dengan cara:
5. Mengunggah (upload) video ke akun Youtube pribadi peserta dengan format judul: "Lomba Membaca Teks Proklamasi FPKS DPR RI - NAMA"
6. Mengirim url youtube tersebut ke No. WA 0852 2800 2986 atas Nama Yoandro.
7. Menyebarkan video yang telah diupload ke akun pribadi peserta instagram atau facebook atau twitter dengan tag ke akun instagram @fraksipksdprri, facebook @FraksiPKSDPRRI dan twitter @FPKSDPRRI dengan mencantumkan hashtag **#LombaMembacaTeksProklamasiFPKSDPRRI**
8. Upload ke IG Potongan Video dengan hastag **#LombaMembacaTeksProklamasiFPKS,**
9. Tag 5 teman terdekat Follow akun IG Fraksi PKS DPR RI
10. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap salah satu peraturan atau syarat dan ketentuan lomba, panitia berhak membatalkan kemenangan pemenang yang sudah diumumkan. Pemenang yang dibatalkan wajib mengembalikan seluruh hadiah lomba dalam keadaan utuh seperti kondisi saat diterima.a

## Periode Lomba

- Launching/Publikasi :  
Jum'at, 7 Agustus 2020
- Penerimaan Video Maksimal :  
Kamis 20 Agustus 2020 pukul 24.00 WIB
- Pengumuman Finalis via socmed :  
Senin 24 Agustus 2020

## Aspek Penilaian

1. Kemiripan suara dengan Soekarno
2. Penjiwaan
3. Vokal / Artikulasi / Intonasi
4. Likers & Comment
5. Orisinalitas
6. Setting tempat

## Hadiah

Juara 1	: Rp. 5.000.000,-
Juara 2	: Rp 3.500.000,-
Juara 3	: Rp 2.000.000,-
Juara Harapan 1	: Rp 1.000.000,-
Juara Harapan 2	: Rp 500.000,-

## Nara Hubung

**Yoandro**  
0852 2800 2986



# SAKSIKAN

## KREASI KEMERDEKAAN

Dari **17** Anggota DPR RI FPKS, Persembahkan  
**8** Fraksi PKS Daerah Selama **4,5** Jam



Temukan keceriaan Kemerdekaan dengan pelek semangat, Quote bermutu dan ajakan perjuangan.



Kreasi lagu dan pembacaan Puisi dari Aleg FPKS



Disampaikan dari seluruh penjuru Nusantara yang terbentang dari Timur, Tengah dan Barat.



Live Reportase Kemerdekaan yang disampaikan oleh Aleg FPKS yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya.

Mari bersama sambut Kemerdekaan dengan kegembiraan, semangat dan khidmat membantu sesama dimasa pandemi.

**Merdeka.  
Allahuakbar!!**





INDONESIA  
MAJU

DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA  
17 Agustus 2020

# Kreasi Syukuri Kemerdekaan RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Dari **17** Anggota DPR RI FPKS  
Persembahan **8** Fraksi PKS Daerah  
Selama **4,5** Jam



**SAKSIKAN**

**SENIN 17 AGUSTUS 2020**

Dimulai Jam 09.00 s.d 13.30 WIB

Live di akun Facebook dan Youtube Fraksi PKS DPR RI

[f](#) Fraksi PKS DPR RI

[@](#) fraksipksdprri

[@](#) fpksdprri

[@](#) fraksi.pks.id

Berikut Kenangan Mendalam Habib Aboebakar Alhabsy bersama KH Hilmi Aminuddin

Almarhum Ustadz Hilmi adalah seorang murabbi yang sangat ideal, bisa dikatakan sempurna di mata saya.

### 1 Beliau mampu menyiapkan mutarabbinya untuk menghadapi situasi dakwah,

Beliau menyiapkan anak didiknya untuk mampu berdakwah di masyarakat. Coba antum bayangkan, bagaimana beliau dahulu menyiapkan saya yang masih SMP, pakai celana pendek, ditugaskan untuk berdakwah ke kampus nomor wahid di Indonesia. Ana yang masih belia beliau tugaskan untuk masuk berdakwah di UI.

### 2 Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengatur para mutarabbinya.

Kelihaian beliau dalam mengatur ini membuat pada kadernya tidak mungkin untuk menolak setiap penugasan yang diberikan. Selalu hadir keyakinan di hati kami bahwa apa yang disampaikan oleh beliau pasti didasarkan berbagai pertimbangan yang matang.

### 3 Beliau ini seolah menjadi ayah yang sempurna.

Karena beliau mampu mengelola emosi para mutarabbi. Ketika kami ada masalah, beliau selalu memberikan nasihat yang menyenangkan, membuat kepala kami menjadi tenang dan hati kami menjadi tenang.

### 4 Beliau selalu mengedepankan pola pembinaan dalam mendidik para kadernya.

Ustadz Hilmi tidak mau menjustifikasi oleh, selalu melihat kebaikan atas diri seseorang, kemudian dibina sesuai dengan kadar masing-masing

### 5 Dalam mendidik, beliau memberi-kan keteladanan yang luar biasa

Misalkan saja keteladanan sebagai seorang pemimpin. Bahwa pemimpin itu melayani,



# KH. Hilmi Aminuddin *in memoriam* di mata Sang Mutarabbi, Habib Aboebakar Alhabsy

*Pohon Mangga tegak berdiri  
Ditanam ditepi bangunan  
Ustadz Hilmi murabbi sejati  
Mengajarkan kita politik  
peradaban*

*Warna putih bunga melati  
Tumbuh Semerbak  
di depan rumah  
Terima kasih untuk ustadz Hilmi  
Telah mentarbiyah kami  
tanpa lelah*

*Pergi berburu ke hutan rimba  
Dapat buruan rusa jantan  
Ustadz Hilmi Murabbi kita  
Jasa jasanya tidak terlupakan*

bahwa pemimpin itu harus taat aturan, bahwa pemimpin itu harus benar-benar tahu kadernya. Pada suatu pertemuan di GBK beliau ini pernah dilarang masuk oleh kepan-duan, beliau sampai berputar-putar untuk mengikuti protap yang ada.

### 6 Ustadz Hilmi senantiasa membimbing setiap kadernya, beliau ini sangat telaten seperti seorang ibu yang sedang membimbing anaknya

Beliau selalu mengawal agar anak didiknya berdakwah sesuai dengan kaidah keislaman. Kami dibimbing agar selalu dekat dengan Rabb sang pencipta, kami dibimbing agar tidak lelah dalam berjuang, kami dibimbing agar selalu menjadi payung untuk umat.

### 7 Dalam mendidik Ustadz Hilmi selalu mengembangkan potensi kreatif mutarabbinya

Beliau sangat paham betul potensinya masing-masing kadernya, apa potensi Abu Bakar, Apa potensi Fulan dan Fulanah. Beliau selalu berupaya mengembangkan potensi-potensi tersebut agar bermanfaat secara optimal untuk dakwah. Selain itu beliau juga berupaya menajuhkan potensi dari kader tersebut dari situasi yang membahayakan dirinya.



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI